



**BUPATI MALANG
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI MALANG
NOMOR 13 TAHUN 2019
TENTANG
RENCANA KERJA
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN MALANG
TAHUN 2019**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MALANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 142 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Malang Tahun 2019;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pejabat Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 230, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5943);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
15. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2018 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 550);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Malang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2008 Nomor 3/E);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2008 Nomor 4/E);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Malang (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2010 Nomor 2/E);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomor 4 Seri D), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 14 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomor 11 Seri D);

24. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomor 1 Seri C), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 12 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomor 1 Seri C);
25. Peraturan Bupati Malang Nomor 34 Tahun 2017 tentang Mekanisme Tahunan Penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Malang (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2017 Nomor 3 Seri D);
26. Peraturan Bupati Malang Nomor 18 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2019 (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2018 Nomor 11 Seri D);
27. Peraturan Bupati Malang Nomor 37 Tahun 2018 tentang tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Keuangan dan Aset Daerah (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2018 Nomor 4 Seri C);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN MALANG TAHUN 2019

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Malang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Malang.

3. Bupati adalah Bupati Malang.
4. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.
5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
6. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
7. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
8. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan Daerah.
9. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
10. Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis Daerah/Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi.
11. Prioritas Pembangunan Daerah adalah fokus penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang dilaksanakan secara bertahap untuk mencapai sasaran RPJMD.
12. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.
13. Musyawarah perencanaan pembangunan yang selanjutnya disingkat Musrenbang adalah forum antar pemangku kepentingan dalam rangka menyusun rencana pembangunan Daerah.

BAB II

RENCANA KERJA

Pasal 2

Rencana Kerja Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Malang Tahun 2019 merupakan dokumen perencanaan pembangunan Daerah dalam jangka waktu 1 (satu) tahun yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2019 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.

Pasal 3

- (1) Rencana Kerja Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Malang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berisi program, kegiatan dan pagu indikatif Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Malang.
- (2) Dokumen Rencana Kerja Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Malang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan sistematika sebagai berikut:
 - BAB I : Pendahuluan.
 - BAB II : Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu.
 - BAB III : Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah.
 - BAB IV : Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah.
 - BAB V : Penutup.
- (3) Rencana Kerja Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Malang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Malang wajib melaksanakan Rencana Kerja Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Malang.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Malang.

Ditetapkan di Kapanjen
pada tanggal 17 Mei 2019

WAKIL BUPATI MALANG,

ttd.

SANUSI

Diundangkan di Kapanjen
Pada tanggal 17 Mei 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MALANG,

ttd.

DIDIK BUDI MULJONO

Berita Daerah Kabupaten Malang
Tahun 2019 Nomor 8 Seri D

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI MALANG
NOMOR 13 TAHUN 2018
TENTANG
RENCANA KERJA BADAN KEUANGAN
DAN ASET DAERAH KABUPATEN
MALANG TAHUN 2019

**RENCANA KERJA BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN MALANG TAHUN 2019**

**BAB I
PENDAHULUAN**

1.1. LATAR BELAKANG

Rencana Pembangunan Tahunan Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Perangkat Daerah, adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

Sebagai dokumen rencana tahunan Perangkat Daerah, Rencana Kerja Badan Keuangan dan Aset Daerah mempunyai arti yang strategis dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan Pemerintahan Daerah, mengingat beberapa hal sebagai berikut:

1. Rencana Kerja Perangkat Daerah merupakan dokumen yang secara substansial penerjemahan dari program/kegiatan Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam Rencana Strategis Instansi sesuai arahan operasional dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
2. Rencana Kerja merupakan acuan Perangkat Daerah untuk memasukkan program kegiatan ke dalam Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) serta perencanaan program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2019;
3. Rencana Kerja Perangkat Daerah merupakan salah satu instrumen untuk evaluasi pelaksanaan program/kegiatan instansi untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang tercantum dalam Rencana Kinerja Tahunan sebagai wujud dari kinerja Perangkat Daerah pada tahun sebelumnya.

Mengingat arti strategis dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan Pemerintahan Daerah, maka sejak awal tahapan penyusunan hingga penetapan dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah harus mengikuti tata cara dan alur penyusunannya sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Proses penyusunan rancangan Rencana Kerja dimulai dengan adanya surat edaran dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, yang menegaskan bahwa tiap Perangkat Daerah wajib menyusun dan menyampaikan Rancangan Kerja Perangkat Daerah kepada Bupati, Badan Keuangan dan Aset Daerah membentuk Tim Penyusun Rancangan Rencana Kerja yang kemudian bekerja menyusun rancangan Rencana Kerja dengan mengacu pada rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Rencana Strategis Perangkat Daerah, hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan tahun sebelumnya serta dinamika permasalahan yang berkembang dan kebutuhan masyarakat.

Seluruh dokumen perencanaan pembangunan daerah merupakan satu kesatuan yang saling berkaitan satu dengan yang lain. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) adalah dokumen yang menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang merupakan penjabaran dari visi dan misi Pemerintah Daerah. Sebagai bahan masukan penyusunan rancangan RPJMD adalah Rancangan Awal Rencana Strategis Perangkat Daerah. Selanjutnya setelah RPJMD disahkan, maka menjadi acuan penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah. RPJMD dijabarkan dalam RKPD sebagai dokumen perencanaan tahunan.

RKPD digunakan sebagai pedoman/acuan dalam penyusunan rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah. Berkaitan dengan itu, maka RKPD merupakan pedoman awal untuk penyusunan KUA dan PPAS, dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah tahun berkenaan. Dengan mengacu pada RKPD Kabupaten Malang Tahun 2019 yang tertuang dalam Peraturan Bupati Malang Nomor 18 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2019, Badan Keuangan dan Aset Daerah selaku Perangkat Daerah juga berkewajiban menyusun Rencana Kerja sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Keuangan dan Aset Daerah. Rencana Kerja merupakan penjabaran dari Rencana Strategis, dan dalam penyusunannya mengacu pada rancangan awal RKPD. Rencana Kerja juga sebagai bahan masukan untuk penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah. RKA dimaksud selanjutnya menjadi salah satu acuan penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah. Rencana Kerja juga perlu mengakomodir hasil Musrenbang, Forum Pemerintah Daerah, pokok-pokok pikiran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan kebijakan Pemerintah Pusat/Provinsi.

Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2019 merupakan dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun yang akan datang, memuat kebijakan, program dan kegiatan senantiasa disinergikan dan disinkronisasikan dengan dokumen perencanaan yaitu: RPJMD Kabupaten Malang Tahun 2016-2021 dengan Visi dan Misi Madep Manteb Manetep yang telah dijabarkan dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah. Sesuai dengan RPJMD Kabupaten Malang Tahun 2016-2021, maka Badan Keuangan dan Aset Daerah berperan dalam mendukung Misi ke 2 (dua) Bupati Malang yaitu “Memperluas inovasi dan reformasi birokrasi demi tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, akuntabel dan demokratis berbasis teknologi informasi”.

1.2. LANDASAN HUKUM

Landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan Rancangan Rencana Kerja Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Malang Tahun 2018 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pejabat Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 230, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5943);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
15. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2018 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 550);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Malang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2008 Nomor 3/E);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2008 Nomor 4/E);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Malang (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2010 Nomor 2/E);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomor 4 Seri D), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 14 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomor 11 Seri D);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomor 1 Seri C), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 12 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomor 1 Seri C);
25. Peraturan Bupati Malang Nomor 34 Tahun 2017 tentang Mekanisme Tahunan Penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Malang (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2017 Nomor 3 Seri D);
26. Peraturan Bupati Malang Nomor 18 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2019 (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2018 Nomor 11 Seri D);
27. Peraturan Bupati Malang Nomor 37 Tahun 2018 tentang tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Keuangan dan Aset Daerah (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2018 Nomor 4 Seri C).

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud penyusunan Rencana Kerja Badan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2019 adalah untuk menguraikan rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan sesuai dengan tugas dan fungsi, target yang akan dicapai, serta kerangka pendanaannya sebagai dasar pelaksanaan kegiatan pada Tahun 2019.

Sedangkan tujuan sebagai berikut:

1. sebagai pedoman atau acuan dalam melaksanakan program dan kegiatan yang akan dikerjakan dalam 1 (satu) tahun anggaran;
2. memberikan masukan utama dan mendasar bagi perencanaan ditingkat yang lebih tinggi;
3. menciptakan keterpaduan program dan kegiatan Badan Keuangan dan Aset Daerah;
4. mengarahkan program dan kegiatan selama satu tahun dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Rencana Strategis Badan Keuangan dan Aset Daerah;
5. sebagai bahan evaluasi kegiatan tahun sebelumnya.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Adapun sistematika Rancangan Akhir Rencana Kerja Badan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Malang adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Dasar Hukum Penyusunan
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA TAHUN LALU

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun Lalu dan Capaian Rencana Strategis Analisis Kinerja Pelayanan
- 2.2. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi
- 2.3. Review terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.4. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

- 3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja
- 3.3. Program dan Kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V PENUTUP

BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Badan Keuangan Dan Aset Daerah Tahun 2017 dan Capaian Rencana Strategis Analisis Kinerja Pelayanan

Evaluasi dilakukan guna melihat sejauh mana pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan kemudian mengukur tingkat pencapaian dengan melihat kendala atau permasalahan yang terjadi untuk dicarikan solusi dan pemecahannya sehingga tujuan kegiatan dapat tercapai secara optimal sesuai dengan yang ditetapkan.

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah, bahwa Badan Keuangan Dan Aset Daerah merupakan pemisahan dari Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset sehingga Tahun 2017 menjadi Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Malang dan berubah nama Tahun 2019 menjadi Badan Keuangan Dan Aset Daerah terbentuk dengan *program dan kegiatan yang tertera pada tabel 2.1 antara lain:*

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dengan 13 kegiatan;
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur; dengan 5 kegiatan;
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur dengan 1 kegiatan;
4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dengan 1 kegiatan;
5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan dengan 3 kegiatan;
6. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah 12 kegiatan;
7. Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dengan 2 kegiatan;
8. Program Peningkatan Implementasi Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah dengan 1 kegiatan;
9. Program Pengelolaan Anggaran Pemerintah Daerah dengan 6 kegiatan;

10. Program Pengelolaan Perbendaharaan Pemerintah Daerah dengan 6 kegiatan;
11. Program Pengelolaan Aset Pemerintah Daerah dengan 2 kegiatan.

Sasaran Program Kerja Badan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2017 untuk mendukung Sasaran Rencana Strategis (Renstra) antara lain:

1. Meningkatnya dan mengembangkan kemampuan aparatur dan memberikan pelayanan prima melalui program:
 - a. Program Pelayanan administrasi perkantoran dengan melaksanakan kegiatan:
 1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat dengan target 15.000 surat;
 2. Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air & listrik dengan target 36 rekening/ bulan;
 3. Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah dengan target 5 jenis
 4. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan, dengan target 12 OB;
 5. Penyediaan Alat Tulis Kantor, dengan target 51 Jenis;
 6. Penyediaan Barang Cetak & Penggandaan, dengan target 41 jenis;
 7. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor, dengan target 74 jenis;
 8. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan dengan target 6 jenis;
 9. Penyediaan Bahan Logistik Kantor target 200 jenis;
 10. Penyediaan Makan & Minum, dengan target 36.768 HOK;
 11. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah, dengan target 30 HOK;
 12. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah, dengan target 40 HOK;
 13. Pengelolaan Administrasi Perkantoran dan Pengendalian Kepegawaian, dengan target 15 Dokumen;
 - b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, dengan melaksanakan kegiatan yaitu:
 1. Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional, dengan target 4 unit;

2. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor, dengan target 180 unit;
 3. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor, dengan target 14 Unit;
 4. Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional dengan Target 64 unit;
 5. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor dengan target 188 unit.
- c. Program Peningkatan Disiplin Aparatur dengan kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya dengan target 26020 Stel.
 - d. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dengan kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal dengan target 213 kali;
 - e. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja & Keuangan dengan kegiatan:
 1. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja & Ikhtisar Realisasi Kinerja PD, target 100 Buku;
 2. Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran, target 550 Buku;
 3. Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun, target 380 Buku.
2. Meningkatnya tertib administrasi dalam proses pengelolaan keuangan daerah melalui program:
 - a. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah, dengan kegiatan:
 1. Penyusunan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah, target 200 Buku;
 2. Penyusunan Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah, target 450 Buku;
 3. Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang APBD, target 390 Buku;
 4. Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran APBD, target 410 Buku;
 5. Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan APBD, Target 260 Buku;
 6. Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran Perubahan APBD, target 560 Buku;
 7. Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD, target 450 Buku;

8. Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD, target 550 buku;
 9. Penyusunan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah, Target 2 paket;
 10. Bimbingan Teknis Implementasi Paket regulasi tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, target 82 PD;
 11. Peningkatan Manajemen Investasi Daerah, target 75 Dokumen;
 12. Revaluasi/Appraisal Aset/Barang Daerah, target 82 PD;
- b. Program Pembinaan Dan fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa
1. Pembinaan dan Fasilitasi Penyusun APBDes 1134 Aparatur Desa;
 2. Peningkatan Penatausahaan Anggaran Desa 1134 Aparatur Desa;
- c. Program Peningkatan Implementasi Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah
1. Monitoring Dan Evaluasi Penatausahaan Keuangan Daerah dengan target 82 PD
- d. Program Pengelolaan Anggaran Pemerintah Daerah
1. Evaluasi dan Asistensi Penyusunan Rencana Kerja Anggaran PD, target 82 PD;
 2. Evaluasi dan Asistensi Penyusunan Rencana Kerja Anggaran Perubahan PD, target 82 PD;
 3. Peningkatan Pengelolaan Anggaran Daerah, target 82 PD;
 4. Peningkatan Pengelolaan Belanja Hibah dan Bantuan Sosial dari APBD, target 500 buku;
 5. Peningkatan Transparasi Pengelolaan Keuangan, target 6 jenis;
 6. Analisa Pengelolaan Keuangan Daerah/Desa, target 100 buku;
- e. Program Pengelolaan Perbendaharaan Pemerintah Daerah
1. Pengendalian dan Pelaporan Berkala Dana Transfer Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, target 82 buku;
 2. Peningkatan dan Pengendalian Manajemen Kas Daerah, target 12 bulan;
 3. Pengendalian dan Pembinaan Keuangan BLUD, target 15 Dokumen
 4. Peningkatan Penatausahaan Belanja Daerah, target 13.000 SP2D;

5. Pengelolaan Belanja Pegawai, target 12 bulan;
6. Penanganan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi, target 123 Dokumen;
3. Meningkatnya tertib administrasi dalam proses pengelolaan Barang Milik Daerah melalui program:
 - b. Program Pengelolaan Aset Pemerintah Daerah, dengan kegiatan:
 1. Investasi Barang Milik Daerah, target 82 PD;
 2. Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah, target 100 buku.

Kegiatan yang mencapai Prosentase realisasi anggaran sebesar 50 % keatas antara lain:

1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat realisasi anggaran , 88,40%;
2. Penyediaan Jasa Komunikasi,sumber daya air & listrik, 96,88%;
3. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan, 71,03%;
4. Penyediaan Alat Tulis Kantor, 99,97 %;
5. Penyediaan Barang Cetakan & Penggandaan, 96,42 %;
6. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor, 99,96%
7. Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-undangan, 80,00%;
8. Penyediaan Bahan Logistik Kantor, 80,60%
9. Penyediaan Makanan & Minuman, 99,23%;
10. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah, 85,69%
11. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah, 66,94%
12. Pengelolaan Administrasi Perkantoran dan Pengendalian Kepegawaian, 88,44%;
13. Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional, 7,34%;
14. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor,78,44%
15. Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor, 99,73%;
16. Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional, 90,75%
17. Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung Kantor, 99,99%
18. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya, 93,54%
19. Pendidikan & Pelatihan Formal, 95,36%
20. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja & Ikhtisar Realiasi Kinerja PD, 89,48%;
21. Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran, 99,08%;
22. Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun, 76,62%;
23. Penyusunan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah, 99,75%;

24. Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang APBD, 96,62%;
25. Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran APBD, 98,27%;
26. Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan APBD, 92,95%;
27. Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran Perubahan APBD, 94,32%;
28. Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD, 99,55%;
29. Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD, 99,70%;
30. Penyusunan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah, 89,51%;
31. Bimbingan Teknis Implementasi Paket regulasi tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, 93,63%;
32. Peningkatan Manajemen Investasi Daerah, 96,54%;
33. Revaluasi/Appraisal Aset/Barang Daerah, 88,93%;
34. Pembinaan dan Fasilitasi Penyusunan APBDes, 82,91%
35. Peningkatan Penatausahaan Anggaran Desa, 82,18%
36. Monitoring dan Evaluasi Penatausahaan Pengelolaan Keuangan Daerah, 98,17%;
37. Evaluasi dan Asistensi Penyusunan Rencana Kerja Anggaran SKPD, 90,99%;
38. Evaluasi dan Asistensi Penyusunan Rencana Kerja Anggaran Perubahan PD, 85,04%;
39. Peningkatan Pengelolaan Anggaran Daerah, 92,74%;
40. Peningkatan Pengelolaan Belanja Hibah dan Bantuan Sosial dari APBD, 87,15%;
41. Peningkatan Transparansi Pengelolaan Keuangan, 89,05%;
42. Analisa Pengelolaan Keuangan Daerah/Desa, 84,13%;
43. Pengendalian dan Pelaporan Berkala Dana Transfer Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, 98,36%;
44. Peningkatan dan Pengendalian Manajemen Kas Daerah, 99,40%;
45. Pengendalian dan Pembinaan Keuangan BLUD, 84,13%;
46. Peningkatan Penatausahaan Belanja Daerah, 93,66%;
47. Pengelolaan Belanja Pegawai, 98,94%;
48. Penanganan Tuntutan Perbendaharaan / Tuntutan Ganti Rugi, 96,55%;
49. Inventarisasi Barang Milik Daerah, 91,62%;
50. Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah, 88,40%;

Kegiatan yang mencapai kurang dari 50 % sebanyak 1 (satu) kegiatan antara lain:

1. Pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasional tercapai 7,34% Karena Pengadaannya ditangguhkan ditahun 2018

Faktor-faktor penyebab terpenuhi dan tidak terpenuhi target kinerja program/kegiatan, implikasi yang timbul terhadap target capaian dan kebijakan/tindakan perencanaan & penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab, diuraikan pada tabel berikut ini :

Tabel Kegiatan dan Faktor Penyebab serta Kebijakan/Tindakan yang perlu diambil :

No.	Nama Kegiatan	FAKTOR PENYEBAB	KEBIJAKAN/TINDAKAN YANG PERLU DIAMBIL
1	Penyusunan Kebijakan akuntansi Pemerintah Daerah	Pelaksana Penatausahaan Keuangan PD belum seluruhnya dapat memahami maksud Perbup tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah	Dilakukan sosialisasi Perbup
2	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang APBD	1 Adanya sebagian Pendapatan yang belum dapat diprediksi khususnya Dana-Dana Transfer pada awal penyusunan APBD 2 Ajuan PD belum mengacu pada kemampuan Keuangan Daerah	Melakukan koordinasi apabila mungkin dan memakai alokasi definitif tahun lalu Dilakukan skala prioritas bagi setiap ajuan dapat memenuhi seluruh komponen
3	Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran APBD	1 Ketepatan waktu untuk penyusunan Raperbup Penjabaran APBD terhambat dengan penetapan Perda APBD 2 Peraturan dan pedoman penyusunan APBD terhambat dari pusat pada saat mulai menyusun APBD	Dilakukan penyusunan Draft Raperbup bersama sama dengan pembahasan APBD Tetap mengacu pada pedoman tahun lalu
4	Penyusunan Rancangan Perda Tentang Perubahan APBD	Waktu dan jadwal perubahan sering terhambat karena usulan dari PD belum dapat sepenuhnya masuk	Dibuatkan Surat Edaran dan Jadwal penyampaian Usulan
5	Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran Perubahan APBD	Banyak Perubahan-Perubahan yang dilakukan PD yang tidak sesuai rencana Perubahan Perda	Dikembalikan ke PD untuk disesuaikan dengan rencana Perubahan Perda APBD yang semestinya

No.	Nama Kegiatan	FAKTOR PENYEBAB	KEBIJAKAN/TINDAKAN YANG PERLU DIAMBIL
6	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggung jawaban Pelaksanaan APBD	1 Pelaksanaan rekonsiliasi pendapatan dan belanja PD sering terlambat tidak sesuai dengan jadwal yang ditentukan 2 Pengisian form-form terkait dengan penjelasan tentang Laporan Keuangan, Aliran Kas dan Neraca PD belum dapat disusun secara tepat waktu 3 Pembahasan-pembahasan dari TAPD dan Panggar perlu menjadi perhatian pada waktu yang ditentukan	Melakukan koordinasi dan pengendalian bagi setiap PD untuk melakukan pencocokan perangkaan pendapatan dan belanja di Bidang Akuntansi dan Pelaporan BPKAD Diberikan Edaran tentang contoh pengisian form yang tepat dan bila perlu untuk datang ke BKAD Dibuatkan jadwal dan surat pemberitahuan agar segera dilakukan pembahasan setelah dilakukan Audited oleh BPK
7	Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran Pertanggung jawaban Pelaksanaan APBD	Banyak Perubahan-Perubahan yang dilakukan PD yang tidak sesuai dengan Perda	Dikembalikan ke PD untuk disesuaikan dengan Perda APBD
8	Bimbingan Teknis Implementasi Paket Regulasi tentang Pengelolaan Keuangan Daerah	Penyerapan anggaran pada kegiatan bimbingan teknis implementasi paket regulasi tentang pengelolaan keuangan daerah tidak ada kendala yang berarti karena kegiatannya disesuaikan dengan kebutuhan rill.	
9	Peningkatan Manajemen Aset/Barang Daerah	Secara umum tidak ada hambatan dalam pelaksanaan kegiatan namun masih perlu dilakukan kembali perbaikan dan peningkatan Sumber Daya pada tahun-tahun anggaran berikutnya	Harus dilakukan Rekonsiliasi pencocokan secara rutin, Data Asset PD dengan Data Aset yang ada pada Bidang Aset yaitu SIMDA BMD
10	Pengendalian dan Pelaporan Berkala Dana Transfer Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah	Sering adanya keterlambatan pelaporan dan bukti transfer dari pusat dan propinsi	- Perlu dilakukan rekonsiliasi secara periodik dan kecepatan pelaporan melalui fax maupun email - Pengisian form laporan yang telah ditentukan secara lengkap
11	Peningkatan dan Pengendalian manajemen Kas Daerah	Jadwal waktu pencairan yang terlambat disebabkan karena kelengkapan berupa Dokumen pencairan PD belum mencukupi	Agar dilakukan penetapan jadwal dan kelengkapan Dokumen Pencairan PD serta tidak sering mengganti Bendahara PD, operator SIMDA dan pengelola keuangan lainnya
12	Pengendalian dan Pembinaan Keuangan BLUD	Belum maksimalnya terhadap pola Pengelolaan Keuangan terhadap PD yang menerapkan PPK - BLUD	Dilakukannya pembinaan pola pengelolaan BLUD

No.	Nama Kegiatan	FAKTOR PENYEBAB	KEBIJAKAN/TINDAKAN YANG PERLU DIAMBIL
13	Pengelolaan Belanja Pegawai	<p>1 Pelaporan tentang mutasi, kenaikan pangkat dan gaji berkala termasuk tunjangan keluarga sering terjadi keterlambatan dari masing-masing PD sehingga tidak segera dapat dilakukan penyesuaian</p> <p>2 Adanya mutasi PNS dari luar Kabupaten yang tidak segera dilaporkan ke Bidang Perbendaharaan sehingga berpengaruh ketersediaan anggaran Belanja Gaji Pegawai</p>	<p>Dilakukan koordinasi dan ketepatan waktu penyampaian terkait penetapan SK perubahan gaji agar tidak terjadi keterlambatan dalam pembayaran yang tidak sesuai yang diterimakan</p> <p>Dilakukan koordinasi dengan instansi asal dari perhitungan</p>
14	Evaluasi dan Asistensi Penyusunan Rencana Kerja Anggaran PD dan Perubahannya	Belum adanya sinkronisasi antara RKA PD dengan RKPD yang telah ditetapkan	Perlu dilakukan penyesuaian dengan RKPD
15	Peningkatan Pengelolaan Anggaran Daerah	Upaya pemerintah dalam meningkatkan pendapatan dari investasi untuk membiayai kegiatan yang memerlukan dana yang besar perlu pencadangan dana	Perlu kecepatan penyusunan Raperda sebagai dasar pelaksanaan
16	Monitoring dan Evaluasi Penata Usahaan Pengelolaan Keuangan Daerah	Secara umum tidak ada hambatan pada pelaksanaan kegiatan ini namun diharapkan PD dalam menyusun laporan keuangan tepat waktu	Dilakukan rekonsiliasi pencocokan data belanja maupun pendapatan antara PD dengan Bidang Akuntansi dan Pelaporan
17	Penanganan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi	Secara umum tidak ada hambatan pada pelaksanaan kegiatan namun diharapkan lebih ditingkatkan koordinasi dengan Inspektorat karena terkait dengan SKTJM	Rekonsiliasi antara Bidang Perbendaharaan BKAD dengan Inspektorat untuk pencocokan data SKTJM juga angsuran dalam kasus TPTGR
18	Peningkatan Pengelolaan Belanja Hibah dan Bantuan Sosial dari APBD	Secara umum tidak ada hambatan dalam pelaksanaan kegiatan ini namun dibutuhkan ketepatan waktu dalam penyusunan lampiran Perda tentang Belanja Hibah dan Bantuan Sosial	Melakukan koordinasi dengan PD terkait

Tabel 2.1
Rekapitulasi Hasil Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja PD dan Pencapaian Renstra PD s/d Tahun 2018
Badan Keuangan dan Aset Daerah

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2016 - 2021 (periode Renstra PD)	Realisasi target Kinerja Hasil Program dan keluaran kegiatan s/d Tahun 2016	Target & Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2017			Target Program dan Kegiatan Renja PD Tahun berjalan Tahun 2018	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Program/kegiatan Renstra PD s/d Tahun 2018	
					Target Renja PD Tahun 2017	Realisasi Renja PD Tahun 2017	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian	Tingkat Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10	11=(10/4)
I	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kelancaran administrasi perkantoran								
1.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah registrasi surat masuk dan surat keluar	60.000 surat	15000 surat	15.000 surat	9955 surat	66,37	10.000 surat	19.955 surat	33,26
2.	Penyediaan Jasa Komunikasi,sumber daya air & listrik	Jumlah penyediaan listrik ,air minum/air bersih, telekomunikasi dan internet	12 bulan	1 Tahun	12 bulan	12 bulan	100,00	12 bulan	24 bulan	100,00
3.	Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah	Jumlah jaminan barang milik daerah yang disediakan	-	1 Paket	0	0	0,00	0	0	0,00
4.	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah pejabat pengelola administrasi keuangan	12 bulan	12 OB	12 bulan	12 bulan	100,00	12 bulan	24 bulan	100,00
5.	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah alat tulis kantor yang disediakan	51 Jenis	24 Paket	51 Jenis	51 Jenis	100,00	51 Jenis	102 Jenis	100,00
6.	Penyediaan Barang Cetak & Penggandaan	Jumlah barang cetakan yang disediakan (Jenis)	41 Jenis	24 Paket	41 Jenis	39 Jenis	95,12	41 Jenis	80 Jenis	97,56
7.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah pengadaan komponen instalasi listrik	74 Jenis	13 Paket	74 Jenis	74 Jenis	100,00	74 Jenis	148 Jenis	100,00
8.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	6 jenis	-	6 Jenis	6 Jenis	100,00	6 Jenis	12 Jenis	100,00

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2016 - 2021 (periode Renstra PD)	Realisasi target Kinerja Hasil Program dan keluaran kegiatan s/d Tahun 2016	Target & Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2017			Target Program dan Kegiatan Renja PD Tahun berjalan Tahun 2018	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Program/kegiatan Renstra PD s/d Tahun 2018	
					Target Renja PD Tahun 2017	Realisasi Renja PD Tahun 2017	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian	Tingkat Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10	11=(10/4)
9.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan	1000 Jenis	12 bulan	200 Jenis	161 Jenis	80,50	200 Jenis	361 Jenis	36,10
10.	Penyediaan Makanan & Minuman	Jumlah makanan dan minuman harian pegawai, rapat, dan tamu yang disediakan	220.620 HOK	36768 Pak	36.378 HOK	36.486 HOK	99,48	36.770 HOK	73.256 HOK	33,20
11.	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas keluar daerah	1000 HOK	30 kali	190 HOK	162 HOK	85,26	200 HOK	362 HOK	36,20
12.	Rapat kordinasi dan konsultasi ke Dalam Daerah	Jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas ke dalam daerah	800 HOK	40 kali	180 HOK	120 HOK	66,67	200 HOK	320 HOK	40,00
13.	Pengelolaan Administrasi Perkantoran dan Pengendalian	Jumlah Laporan Pengendalian Kepegawaian yang disusun secara Periodik	15 Dokumen	12 bulan	15 Dokumen	13 Dokumen	86,67	15 Dokumen	28 Dokumen	93,33
II.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan sarana prasarana yang berfungsi dengan baik								
1.	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional Roda Dua baru yang diadakan	6 Unit	-	3 Unit	0	0,00	6 unit	6 unit	100,00
2.	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang diadakan	180 unit	180 unit	180 Unit	141 Unit	78,33	180 unit	321 Jenis	89,17
3.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara Rutin/Berkala	9 ruangan	14 paket	9 ruangan	9 ruangan	100,00	9 ruangan	18 ruangan	100,00

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2016 - 2021 (periode Renstra PD)	Realisasi target Kinerja Hasil Program dan keluaran kegiatan s/d Tahun 2016	Target & Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2017			Target Program dan Kegiatan Renja PD Tahun berjalan Tahun 2018	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Program/kegiatan Renstra PD s/d Tahun 2018	
					Target Renja PD Tahun 2017	Realisasi Renja PD Tahun 2017	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian	Tingkat Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10	11=(10/4)
4.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Kendaraan Roda empat dan kendaraan roda dua yang dipelihara rutin dan berkala	64 Unit	64 unit	64 Unit	58 Unit	90,63	64 Unit	122 Unit	95,31
5.	Pemeliharaan rutin / Berkala peralatan Gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara rutin/berkala	188 unit	188 unit	188 unit	187 unit	99,47	188 unit	375 unit	99,73
III.	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Penunjang Aparatur								
1.	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah penyediaan Pakaian Dinas	220,620 stel	220,620 stel	26,020 stel	24,339 stel	93,54	125 stel	24,464 stel	11,09
IV.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Cakupan pemenuhan kompetensi sumber daya aparatur								
1.	Pendidikan & pelatihan formal	Jumlah pegawai yang mengikuti pelatihan	20 orang	213 kali	20 orang	19 orang	95,00	20 orang	39 orang	97,50
V.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja & Keuangan	Persentase Dokumen Perencanaan, Laporan Keuangan dan Kinerja Perangkat Daerah yang tepat waktu								
1.	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja & Ikhtisar Realiasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen Laporan Kinerja (LKJ-IP/Profile Kinerja PD/Survei Kepuasan Masyarakat)	100 buku	100 buku	100 buku	89 buku	89,00	100 buku	189 buku	94,50

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2016 - 2021 (periode Renstra PD)	Realisasi target Kinerja Hasil Program dan keluaran kegiatan s/d Tahun 2016	Target & Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2017			Target Program dan Kegiatan Renja PD Tahun berjalan Tahun 2018	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Program/kegiatan Renstra PD s/d Tahun 2018	
					Target Renja PD Tahun 2017	Realisasi Renja PD Tahun 2017	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian	Tingkat Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10	11=(10/4)
2.	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	Jumlah dokumen laporan keuangan semester I dan semester II	550 buku	550 buku	550 buku	544 buku	98,91	550 buku	1,094 buku	99,45
3.	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah buku keuangan akhir tahun yang disusun	380 Buku	380 buku	380 Buku	291 buku	76,58	380 Buku	671 Buku	88,29
VI.	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Tingkat Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah yang Efektif, Efisien, Transparan dan Akuntabel								
1.	Penyusunan kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah	Jumlah Buku pedoman kebijakan Akuntansi yang disusun	200 Buku	200 buku	200 buku	199 buku	99,50	-	-	-
2.	Penyusunan Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah	Jumlah Buku Sistem dan prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah yang disusun	450 buku	450 buku	450 buku	0	0,00	-	-	-
3.	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang APBD	Jumlah Perda APBD sesuai kriteria dan tepat waktu	390 buku	390 buku	390 Buku	390 Buku	100	-	-	-
4.	Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran APBD	Jumlah Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran APBD	410 Buku	410 buku	410 Buku	402 Buku	98,05	-	-	-
5.	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan APBD	Jumlah Perda Perubahan APBD sesuai kriteria	260 Buku	260 buku	260 Buku	241 Buku	92,69	-	-	-

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2016 - 2021 (periode Renstra PD)	Realisasi target Kinerja Hasil Program dan keluaran kegiatan s/d Tahun 2016	Target & Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2017			Target Program dan Kegiatan Renja PD Tahun berjalan Tahun 2018	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Program/kegiatan Renstra PD s/d Tahun 2018	
					Target Renja PD Tahun 2017	Realisasi Renja PD Tahun 2017	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian	Tingkat Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10	11=(10/4)
6.	Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Perbup Penjabaran Perubahan APBD yang disusun sesuai kriteria dan tepat waktu	560 buku	560 buku	560 Buku	528 Buku	94,29	-	-	-
7.	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah Perda Pertanggungjawaban APBD yang disusun	450 buku	450 buku	450 Buku	447 Buku	99,33	-	-	-
8.	Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah Perbup Penjabaran Pertanggungjawaban APBD yang disusun	550 buku	550 buku	550 Buku	548 Buku	99,64	-	-	-
9.	Penyusunan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah	Jumlah Aplikasi Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah	2 Aplikasi	2 paket	2 Aplikaasi	2 Aplikaasi	100	-	-	-
10.	Bimbingan Teknis Implementasi Paket regulasi tentang Pengelolaan Keuangan Daerah	Jumlah peserta Bimtek Pengelolaan Keuangan Daerah	82 PD	98 PD	82 PD	82 PD	100	-	-	-
11.	Peningkatan Manajemen Investasi Daerah	Jumlah Penyusunan Laporan Investasi Daerah terhadap BUMD	75 Dokumen	75 dokumen	72 Dokumen	69 Dokumen	95,83	-	-	-
12	Revaluasi/Appaisal Aset/Barang Daerah	Jumlah bidang tanah yang disertifikat	100 Bidang	100 bidang	100	88 Bidang	88,00	-	-	-
13	Intensifikasi dan Ekstensifikasi sumber-sumber Pendapatan Daerah	Jumlah penerimaan pajak dan lain-lain pendapatan asli daerah yang ditargetkan tercapai	10 sektor pajak dan retribusi	10 sektor pajak dan retribusi	-	-	-	-	-	-

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2016 - 2021 (periode Renstra PD)	Realisasi target Kinerja Hasil Program dan keluaran kegiatan s/d Tahun 2016	Target & Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2017			Target Program dan Kegiatan Renja PD Tahun berjalan Tahun 2018	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Program/kegiatan Renstra PD s/d Tahun 2018	
					Target Renja PD Tahun 2017	Realisasi Renja PD Tahun 2017	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian	Tingkat Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10	11=(10/4)
VII	Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Cakupan pemenuhan Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa								
1.	Pembinaan dan Fasilitasi Penyusun APBDes	Jumlah peserta Pembinaan dan Fasilitasi Penyusun APBDes	1134 Aparatur Desa	1134 Aparatur Desa	1134 Aparatur Desa	1134 Aparatur Desa	100	1134 Aparatur Desa	2,268 Aparatur Desa	100,00
2.	Peningkatan Penatausahaan Anggaran Desa	Jumlah peserta kegiatan Peningkatan Penatausahaan Anggaran Desa	1134 Aparatur Desa	1134 Aparatur Desa	1134 Aparatur Desa	1134 Aparatur Desa	100	1134 Aparatur Desa	2,268 Aparatur Desa	100,00
VIII.	Program Peningkatan Implementasi Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah	Persentase peningkatan pelaporan dan akuntansi Pemerintah Daerah								
1.	Monitoring dan Evaluasi Penatausahaan Keuangan Daerah	Jumlah PD yang dievaluasi dalam penatausahaan keuangan sesuai kriteria	82 PD	98 PD	82 PD	82 PD	100	-	-	-
IX.	Program Pengelolaan Anggaran Pemerintah Daerah	Cakupan pemenuhan pengelolaan anggaran pemerintah Daerah yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel								
1.	Evaluasi dan Asistensi Penyusunan Rencana Kerja Anggaran SKPD	Jumlah PD yang dievaluasi dan dilakukan pendampingan dalam pembuatan RKA	82 PD	98 PD	82 PD	82 PD	100	-	-	-

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2016 - 2021 (periode Renstra PD)	Realisasi target Kinerja Hasil Program dan keluaran kegiatan s/d Tahun 2016	Target & Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2017			Target Program dan Kegiatan Renja PD Tahun berjalan Tahun 2018	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Program/kegiatan Renstra PD s/d Tahun 2018	
					Target Renja PD Tahun 2017	Realisasi Renja PD Tahun 2017	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian	Tingkat Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10	11=(10/4)
1.	Pengendalian dan Pelaporan Berkala Dana Transfer Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah	Jumlah pelaporan dana transfer yang dilaksanakan (buku)	82 buku	9 Bulan	82 buku	80 buku	97,56	82 buku	162 buku	98,78
2.	Peningkatan dan Pengendalian Manajemen Kas Daerah	Jumlah laporan kas yang seimbangsehingga tidak defisit	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100,00	12 bulan	24 bulan	100,00
3.	Pengendalian dan Pembinaan Keuangan BLUD	Jumlah BLUD yang dilakukan pembinaan terhadap pola pengelolaan keuangan terhadap PD yang menerapkan PPK-BLUD	15 BLUD	15 BLUD	15 BLUD	15 BLUD	100,00	15 BLUD	30 BLUD	100,00
4.	Peningkatan Penatausahaan Belanja Daerah	Jumlah penerbitan SP2D yang terselesaikan	13000 berkas	13000 SP2D	13.000 berkas	12176 berkas	93,66	13000 berkas	25,176 berkas	96,83
5.	Pengelolaan Belanja Pegawai	Jumlah penerbitan daftar gaji dan SKPP yang dikeluarkan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	11 bulan	91,67	12 bulan	23 bulan	95,83
6.	Penanganan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi	Jumlah TPTGR yang terselesaikan khususnya dalam penerbitan SK Bupati pembebanan, pelunasan maupun penghapusan	123 dokumen	123 dokumen	123 dokumen	118 dokumen	95,93	123 dokumen	241 dokumen	97,97
7.	Peningkatan Manajemen Investasi Daerah	Jumlah Penyusunan Laporan Investasi Daerah terhadap BUMD	75 buku	-	-	-	-	75 buku	75 buku	100,00

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2016 - 2021 (periode Renstra PD)	Realisasi target Kinerja Hasil Program dan keluaran kegiatan s/d Tahun 2016	Target & Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2017			Target Program dan Kegiatan Renja PD Tahun berjalan Tahun 2018	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Program/kegiatan Renstra PD s/d Tahun 2018	
					Target Renja PD Tahun 2017	Realisasi Renja PD Tahun 2017	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian	Tingkat Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10	11=(10/4)
1	Penyediaan Jasa Administrasi perpajakan	Jumlah aplikasi, ATK, buku, atau media yang dicetak dan digandakan untuk mendukung kegiatan perpajakan daerah	121 item	121 item	-	-	-	-	-	-
2	Pendataan dan Pemutakhiran data objek pajak	Jumlah Objek pajak yang dimutakhirkan dan dilakukan pendataan baru kedalam data base potensi pajak daerah	40 OPpajak hotel	40 OPpajak hotel	-	-	-	-	-	-
3	Peningkatan Koordinasi dan konsultasi pendapatan daerah	Jumlah pelaksanaan koordinasi dan konsultasi untuk meningkatkan pendapatan daerah	24 kali	24 kali	-	-	-	-	-	-
4	Peningkatan dan pengembangan penerimaan PBB	Jumlah penerimaan PBB sesuai target	52500000000	52500000000	-	-	-	-	-	-
5	Pemutakhiran data obyek PBB	Jumlah hasil pendataan dan penilaian PBB yang diupdate kedalam data base	177249 OP	177249 OP	-	-	-	-	-	-
6	Penagihan dan Monitoring PBB	Jumlah tunggakan PBB yang harus ditagih	1760 WP	1760 WP	-	-	-	-	-	-
7	Pembinaan aparatur pengelolaan pajak daerah	Jumlah pelaksanaan bimbingan teknis	5 kali	5 kali	-	-	-	-	-	-
8	Penyusunan target penerimaan pendapatan daerah	Jumlah target pajak yang harus dicapai	10 sektor pajak daerah	10 sektor pajak daerah	-	-	-	-	-	-

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2016 - 2021 (periode Renstra PD)	Realisasi target Kinerja Hasil Program dan keluaran kegiatan s/d Tahun 2016	Target & Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2017			Target Program dan Kegiatan Renja PD Tahun berjalan Tahun 2018	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Program/kegiatan Renstra PD s/d Tahun 2018	
					Target Renja PD Tahun 2017	Realisasi Renja PD Tahun 2017	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian	Tingkat Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10	11=(10/4)
9	Penyusunan Data Perhitungan dan rekonsiliasi bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah kepada desa	Jumlah rapat koordinasi dan rekonsiliasi data perhitungan bagi hasil PDRD kepada desa	6 kali	6 kali	-	-	-	-	-	-
10	Penghitungan, penetapan, penerbitan dan pendistribusian surat ketetapan pajak daerah	Jumlah penerbitan SKPD	7500 SKPD	7500 SKPD	-	-	-	-	-	-
11	Pelayanan dan pengadministrasian permintaan perforasi benda-benda berharga	Jumlah permintaan karcis yang telah terpenuhi	240 berkas	240 berkas	-	-	-	-	-	-
12	Pelayanan validasi, penelitian dan verifikasi BPHTB	Jumlah permintaan validasi, penelitian dan verifikasi BPHTB	8400 berkas	8400 berkas	-	-	-	-	-	-
13	Penagihan pajak daerah dan retribusi daerah	Jumlah terbayarnya pajak daerah dan retribusi daerah	25000 OP	25000 OP	-	-	-	-	-	-
XIII	Program Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Anggaran Pemerintah Daerah	Persentase Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Anggaran Pemerintah Daerah	100 %							
1	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang APBD	Jumlah Perda APBD sesuai kriteria dan tepat waktu (dokumen)	390 dokumen	390 buku	-	-	-	390 Dokumen	390 Dokumen	100,00
2	Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran APBD	Jumlah Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran APBD	410 dokumen	410 buku	-	-	-	410 Dokumen	410 Dokumen	100,00

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2016 - 2021 (periode Renstra PD)	Realisasi target Kinerja Hasil Program dan keluaran kegiatan s/d Tahun 2016	Target & Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2017			Target Program dan Kegiatan Renja PD Tahun berjalan Tahun 2018	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Program/kegiatan Renstra PD s/d Tahun 2018	
					Target Renja PD Tahun 2017	Realisasi Renja PD Tahun 2017	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian	Tingkat Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10	11=(10/4)
3	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan APBD	Jumlah Perda Perubahan APBD sesuai kriteria	260 dokumen	260 buku	-	-	-	260 Dokumen	260 Dokumen	100,00
4	Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Perbup Penjabaran Perubahan APBD yang disusun sesuai kriteria dan tepat waktu	560 dokumen	560 buku	-	-	-	560 Dokumen	560 Dokumen	100,00
5	Peningkatan Pengelolaan Anggaran Daerah	Jumlah peserta Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan tentang Pengelolaan Keuangan Daerah	164 orang	-	-	-	-	164 orang	164 orang	100,00
6	Peningkatan Pengelolaan Belanja Hibah dan Bantuan Sosial dari APBD	Jumlah lampiran Perbup tentang Penjabaran APBD yang memuat Daftar Nama dan Alamat Calon penerima hibah dan bantuan sosial	500 dokumen	-	-	-	-	500 Dokumen	500 Dokumen	100,00
7	Evaluasi dan Asistensi Penyusunan Rencana Kerja Anggaran /DPA dan Perubahannya	Jumlah PD yang dievaluasi dan dilakukan pendampingan dalam pembuatan RKA (PD) dan Perubahannya	82 PD	-	-	-	-	82 PD	82 PD	100,00
XIV	Program Peningkatan Pelaporan dan Akuntansi Pemerintah Daerah	Persentase Peningkatan Pelaporan dan Akuntansi Pemerintah Daerah	100 %							
1	Monitoring dan Evaluasi Penatausahaan Keuangan Daerah	Jumlah PD yang dievaluasi dalam penatausahaan keuangan sesuai	82 PD	-	-	-	-	82 PD	82 PD	100,00

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2016 - 2021 (periode Renstra PD)	Realisasi target Kinerja Hasil Program dan keluaran kegiatan s/d Tahun 2016	Target & Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2017			Target Program dan Kegiatan Renja PD Tahun berjalan Tahun 2018	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Program/kegiatan Renstra PD s/d Tahun 2018	
					Target Renja PD Tahun 2017	Realisasi Renja PD Tahun 2017	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian	Tingkat Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10	11=(10/4)
		kriteria								
2	Penyusunan kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah	Jumlah Buku pedoman kebijakan Akutansi yang disusun	200 Buku	-	-	-	-	200 Buku	0	0
3	Penyusunan Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah	Jumlah Buku Sistem dan prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah yang disusun	450 buku	-	-	-	-	450 buku	0	0
4	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah Perda Pertanggungjawaban APBD yang disusun	450 Dokumen	450 buku	-	-	-	450 Dokumen	173 Dokumen	38,44
5	Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah Perbup Penjabaran Pertanggungjawaban APBD yang disusun	550 Dokumen	450 buku	-	-	-	550 Dokumen	227 Dokumen	41,27
6	Penyusunan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah	Jumlah Aplikasi Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah	2 Aplikasi	-	-	-	-	2 Aplikasi	2 Aplikasi	100,00
7	Bimbingan Teknis Implementasi Paket regulasi tentang Pengelolaan Keuangan Daerah	Jumlah peserta Bimtek Pengelolaan Keuangan Daerah	164 orang	-	-	-	-	164 orang	164 orang	100,00

2.2. Analisa Kinerja Pelayanan Badan Keuangan dan Aset Daerah

Pelayanan yang dilaksanakan oleh Badan Keuangan dan Aset Daerah sebagai **Perangkat Daerah** dalam penyelenggaraan Administrasi Pengelolaan Keuangan Daerah yaitu:

- a. Perumusan kebijakan teknis Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
- b. Penyusunan Rancangan APBD dan Rancangan Perubahan APBD;
- c. Pengesahan DPA-Perangkat Daerah/DPPA-Perangkat Daerah;
- d. Pelaksanaan kegiatan ketatausahaan dan akuntansi;
- e. Pengelolaan Kas Umum Daerah;
- f. Penetapan surat penyedia Dana;
- g. Penyiapan pelaksanaan pinjaman dan pemberian pinjaman atas nama Pemerintah Daerah;
- h. Pelaksanaan kebijakan dan pedoman pengelolaan serta penghapusan Barang Milik Daerah;
- i. Penyusunan laporan keuangan sebagai pertanggungjawaban realisasi APBD;
- j. Pembinaan administrasi keuangan Daerah;
- k. Penyajian informasi keuangan Daerah; dan
- l. Pelaksanaan standar pelayanan minimal yang wajib dilaksanakan di bidang pengelolaan keuangan dan aset.

Kepala Badan bertindak selaku **Pejabat Pengelola Keuangan Daerah** dengan tugas :

- a. Menyusun dan melaksanakan kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah;
- b. Menyusun Rancangan APBD dan Rancangan Perubahan APBD;
- c. Melaksanakan fungsi BUD;
- d. Menyusun Laporan Keuangan Daerah dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD; dan
- e. Melaksanakan tugas lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Bupati.

Kepala Badan juga melaksanakan fungsinya selaku **Bendahara Umum Daerah (BUD)** berwenang:

- a. Menyusun kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD;
- b. Mengesahkan DPA-Perangkat Daerah/DPPA-Perangkat Daerah;
- c. Melakukan pengendalian pelaksanaan APBD;

- d. Memberikan petunjuk teknis pelaksanaan system penerimaan dan pengeluaran Kas Umum Daerah;
- e. Menetapkan Surat Penyediaan Dana;
- f. Menyiapkan pelaksanaan pinjaman dan pemberian pinjaman atas nama Pemerintah Daerah;
- g. Melaksanakan system akuntansi dan pelaporan keuangan Daerah;
- h. Menyajikan informasi keuangan Daerah; dan
- i. Melaksanakan kebijakan dan pedoman pengelolaan serta penghapusan Barang Milik Daerah.

Untuk mengevaluasi Kinerja Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Malang dengan mengukur capaian kinerja dengan menggunakan capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Keuangan dan Aset Daerah yaitu:

1. Nilai Opini BPK

Opini BPK merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada 4 kriteria yakni :

- Kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan
- Kecukupan pengungkapan
- Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan
- Efektifitas Sistem Pengendalian Internal

2. Persentasi Laporan Keuangan sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)

Persentase Penyajian Laporan Keuangan yang sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dengan formula Jumlah Laporan Keuangan yang sudah direkon dibagi Jumlah Laporan Keuangan Perangkat Daerah

3. Persentase Laporan Keuangan yang tepat waktu

Persentase Laporan Keuangan yang tepat waktu dengan formula Jumlah Laporan Keuangan yang tepat waktu dibagi Jumlah Laporan Keuangan Perangkat Daerah

Laporan Keuangan pemerintah daerah disusun dari kompilasi laporan keuangan PD yang telah terintegrasi dalam sistem informasi pengelolaan keuangan daerah. Laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Malang Tahun Anggaran 2015 telah diselesaikan dan telah diaudit oleh BPK RI dengan opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian),

namun tantangan bagi Badan Keuangan dan Aset Daerah untuk dapat mempertahankan.

Menindaklanjuti Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 235/PMK.07/2015 tentang Konversi Penyaluran Dana Bagi Hasil dan atau Dana Alokasi Umum Dalam Bentuk Tunai, Bidang Akuntansi dan Pelaporan telah memenuhi permintaan berupa data Laporan Realisasi APBD bulanan yang nantinya tiap bulan harus diupload di website resmi Kementerian Keuangan bersamaan dengan data Perkiraan Belanja Operasi dan Belanja Modal Bulanan dari Bidang Anggaran dan Data Posisi Kas Bulanan dari Bidang Perbendaharaan. Diperlukan dukungan data entry pendapatan dari Perangkat Daerah penghasil dalam memenuhi PMK 235/PMK.07/2015, sehingga untuk realisasi pendapatan diperlukan waktu yang sedikit lebih lama dibanding data entry realisasi belanja yang secara otomatis bisa terkoneksi dari Bidang Perbendaharaan.

Dalam Pelaksanaan Standar Akuntansi Berbasis Akrual dalam Penyusunan, Penatausahaan dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Malang masih kurangnya Sumber Daya Aparatur yang kompeten dan handal dalam pengelolaan dan pelaporan keuangan di lingkungan Perangkat Daerah Kabupaten Malang. Uraian di atas dapat dilihat pada tabel 2.2 dibawah ini:

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Malang

No	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra BKAD Tahun ke-				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Indikator Kinerja Utama Badan Keuangan dan Aset Daerah												
1	Persentase SPM PD yang sesuai ketentuan	-	✓	100%	100%	100%	100%	100%	60%	100%	100%	
2	Persentase RKA PD yang sesuai ketentuan	-	✓	100%	100%	100%	100%	100%	60%	100%	100%	
3	Persentase PD yang menyampaikan laporan sesuai ketentuan	-	✓	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
4	Persentase laporan inventaris BMD yang sesuai ketentuan	-	✓	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
5	Persentase Usulan pemanfaatan, penghapusan dan pemindahtanganan BMD	-	✓	60%	60%	65%	65%	60%	35%	65%	65%	
6	Nilai Opini BPK	-	✓	-	-	WTP	WTP	-	-	WTP	WTP	
7	Persentase Penyajian Laporan Keuangan yang sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)	-	✓	-	-	80%	85%	-	-	80%	85%	
8	Persentase laporan keuangan yang tepat waktu	-	✓	-	-	80%	85%	-	-	80%	85%	
Indikator Program-Program Badan Keuangan dan Aset Daerah												
1	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Aparatur	-	✓	80%	80%	85%	90%	80%	90%	85%	90%	
2	Persentase Penunjang Kerja Aparatur	-	✓	80%	80%	85%	90%	80%	90%	85%	90%	

No	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra BKAD Tahun ke-				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3	Persentase Peningkatan Kapasitas Pegawai di Perangkat Daerah	-	✓	85%	85%	85%	85%	85%	20%	85%	85%	
4	Persentase Dokumen Perencanaan, Laporan Keuangan dan Kinerja Perangkat Daerah yang tepat waktu	-	✓	80%	80%	80%	80%	80%	20%	80%	80%	
5	Persentase Pemenuhan Operasional Perkantoran	-	✓	80%	80%	85%	85%	80%	20%	85%	85%	
6	Persentase Pengelolaan Aset Pemerintah Daerah	-	✓	80%	80%	85%	90%	80%	50%	85%	90%	
7	Persentase Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Anggaran Pemerintah Daerah	-	✓	80%	80%	85%	90%	80%	60%	85%	90%	
8	Persentase pemenuhan pembinaan dan fasilitasi pengelolaan Keuangan Desa	-	✓	80%	80%	85%	100%	100%	20%	100%	100%	
9	Persentase pengelolaan perbendaharaan Pemerintah Daerah	-	✓	80%	80%	85%	90%	80%	60%	85%	90%	
10	Persentase peningkatan pelaporan dan akuntansi Perintah Daerah	-	✓	80%	80%	85%	90%	80%	60%	85%	90%	
Indikator Kegiatan-Kegiatan Badan Keuangan dan Aset Daerah												
1	Jumlah Kendaraan Dinas/ Operasional Roda 2 baru yang diadakan (Unit)		✓	4 unit	6 unit	-	-	-	-	-	-	

No	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra BKAD Tahun ke-				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
14	Jumlah Pejabat Pengelola Administrasi Keuangan	-	✓	12 Bulan	12 OB	12 OB	12 OB	12 OB	6 OB	12 OB	12 OB	
15	Jumlah Alat Tulis Kantor yang disediakan	-	✓	51 jenis	51 jenis	51 jenis	51 jenis	51 jenis	38 jenis	51 jenis	51 jenis	
16	Jumlah Barang Cetak Yang disediakan	-	✓	41 jenis	41 jenis	41 jenis	41 jenis	39 jenis	24 jenis	41 jenis	41 jenis	
17	Jumlah Penyediaan Komponen Alat-alat Listrik dan Elektronik	-	✓	74 jenis	74 jenis	74 jenis	74 jenis	77 jenis	21 jenis	74 jenis	74 jenis	
18	Jumlah bahan Logistik Kantor yang disediakan	-	✓	200 jenis	200 jenis	200 jenis	200 jenis	161 buah	108 jenis	200 jenis	200 jenis	
19	Jumlah makanan dan Minuman harian Pegawai, Rapat, dan Tamu yang disediakan	-	✓	36.768 HOK	36.770 HOK	36.770 HOK	36.770 HOK	36.486 pac	21.000 HOK	36.770 HOK	36.770 HOK	
20	Jumlah Pegawai memenuhi Penugasan dinas keluar daerah	-	✓	200 HOK	200 HOK	200 HOK	200 HOK	200 HOK	60 HOK	200 HOK	200 HOK	
21	Jumlah Pegawai memenuhi Penugasan Dinas ke dalam Daerah	-	✓	200 HOK	200 HOK	200 HOK	200 HOK	190 HOK	40 HOK	200 HOK	200 HOK	
22	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	-	✓	6 jenis	6 jenis	6 jenis	6 jenis	6 jenis	6 jenis	6 jenis	6 jenis	
23	Jumlah Laporan Pengendalian Kepegawaian yang Disusun Secara Periodik	-	✓	12 bulan	15 Dokumen	15 Dokumen	15 Dokumen	12 bulan	8 dokumen	15 Dokumen	15 Dokumen	
24	Tercapainya laporan BMD yang akurat	-	✓	82 PD	-	-	-	82 PD	-	-	-	
25	Jumlah Kebutuhan BMD yang direncanakan	-	✓	100 buku	82 PD	82 PD	82 PD	100 buku	82 PD	82 PD	82 PD	
26	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Inventarisir	-	✓	-	82 PD	82 PD	82 PD	-	82 PD	82 PD	82 PD	

No	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra BKAD Tahun ke-				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
38	Jumlah Peserta Pembinaan dan Fasilitasi Penyusunan APBDes	-	✓	1134 Aparatur desa	1134 Aparatur desa	1134 Aparatur desa	1134 Aparatur desa	1134 Aparatur desa	1134 Aparatur desa	1134 Aparatur desa	1134 Aparatur desa	1134 Aparatur desa
39	Jumlah Peserta Kegiatan Peningkatan Penatausahaan Anggaran Desa	-	✓	100 %	1134 Aparatur desa							
40	Jumlah Pelaporan Dana Transfer yang dilaksanakan	-	✓	9 bulan	82 buku	82 buku	82 buku	9 bulan	82 buku	82 buku	82 buku	
41	Jumlah Laporan Kas yang seimbang sehingga tidak defisit	-	✓	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	8 bulan	12 bulan	12 bulan	
42	Jumlah BLUD yang dilakukan Pembinaan terhadap Pola Pengelolaan Keuangan terhadap PD yang Menerapkan PPK-BLUD	-	✓	15 BLUD	15 BLUD	15 BLUD	15 BLUD	15 BLUD	15 BLUD	15 BLUD	15 BLUD	
43	Jumlah Penerbitan SP2D yang terselesaikan	-	✓	13.000 berkas	13.000 berkas	13.000 berkas	13.000 berkas	10.012 berkas	4277 berkas	13.000 berkas	13.000 berkas	
44	Jumlah Penerbitan daftar gaji dan SKKP yang dikeluarkan	-	✓	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	9 bulan	12 bulan	12 bulan	
45	Jumlah TPTGR yang terselesaikan khususnya dalam penerbitan SK Bupati Pembebanan, Pelunasan maupun Penghapusan	-	✓	123 Dokumen	123 dokumen	123 dokumen	123 dokumen	123 dokumen	53 dokumen	123 dokumen	123 dokumen	
46	Jumlah Laporan Investasi Daerah terhadap BUMD yang tersaji	-	✓	75 dokumen	75 buku	75 buku	75 buku	75 dokumen	34 buku	75 buku	75 buku	
47	Jumlah PD yang dievaluasi dalam Penatausahaan keuangan sesuai Kriteria	-	✓	82 PD	82 PD	82 PD	82 PD	82 PD	82 PD	82 PD	82 PD	
48	Jumlah Buku Pedoman Kebijakan Akuntansi yang disusun	-	✓	200 buku	200 buku	200 buku	200 buku	200 buku	-	200 buku	200 buku	

No	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra BKAD Tahun ke-				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
49	Jumlah buku system dan prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah yang disusun	-	✓	450 buku	450 buku	450 buku	450 buku	450 buku	-	450 buku	450 buku	
50	Jumlah Perda Pertanggungjawaban APBD yang disusun	-	✓	450 buku	450 dokumen	450 dokumen	450 dokumen	450 buku	450 dokumen	450 dokumen	450 dokumen	
51	Jumlah Perbup Penjabaran Pertanggungjawaban APBD yang disusun	-	✓	550 buku	550 dokumen	550 dokumen	550 dokumen	550 buku	550 dokumen	550 dokumen	550 dokumen	
52	Jumlah Aplikasi system Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah	-	✓	2 aplikasi	2 aplikasi	2 aplikasi	2 aplikasi	2 aplikasi	2 aplikasi	2 aplikasi	2 aplikasi	
53	Bimbingan teknis implementasi paket regulasi tentang Pengelolaan Keuangan Daerah	-	✓	82 PD	164 orang	164 orang	164 orang	82 PD	-	164 orang	164 orang	

2.3 Isu-Isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah

Berdasarkan tugas dan fungsi Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Malang sebagai berikut :

- a. Melaksanakan urusan pemerintahan daerah bidang Pengelolaan, Keuangan dan Asset berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan;
- b. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

No	Permasalahan	Solusi
1	Sebagai tindak lanjut terbitnya PERMENDAGRI Nomor 19 Tahun 2016, Pemerintah Kabupaten perlu melakukan penggantian terhadap Perda No 4 Tahun 2013 tentang perubahan atas Perda Kab Malang No 3 Tahun 2008 tentang pengelolaan Barang Milik Daerah	BKAD akan segera mengagendakan penyusunan Perda dan Perbup sebagai petunjuk teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah
2	Rendahnya kualitas pengurus barang perangkat daerah dalam melakukan penatausahaan barang milik daerah	Pemberian bimbingan teknis dan sosialisasi kepada pengurus barang seluruh OPD serta pemberian reward antara lain berupa honorarium
3	Lemahnya koordinasi antara Pegawai yang menagai keuangan, melaksanakan pengadaan dengan pengurus barang yang berakibat pada minimnya informasi yang didapatkan oleh pengurus barang dalam rangka pengisian data aset	Rekonsiliasi secara periodik antara pihak yang terkait, pengurus barang seluruh OPD, dan BKAD dalam rangka pemutakhiran data SIMDA BMD
4	Keterbatasan aplikasi software yang dipergunakan dalam penatausahaan barang milik daerah	Berkoordinasi dengan pihak yang dapat menyediakan aplikasi software yang mampu mendukung penatausahaan barang milik daerah dan kebijakan akuntansi
5	Penyimpanan dokumen perolehan aset yang masih belum tertib yang berakibat pada sulitnya melacak asal perolehan, tahun perolehan dan nilai perolehan	Berkoordinasi dengan pihak yang menyediakan aplikasi software agar menambahkan menu scan file dokumen perolehan aset. Agar softcopy dokumen peroleh dapat tersimpan dalam aplikasi SIMDA BMD
6	Penatausahaan Mutasi Barang Milik daerah yang tidak tertib	Kepala Perangkat Daerah segera mengajukan usulan persetujuan pengalihan BMD apabila terjadi mutasi barang daerah yang terjadi di instansinya
7	Perangkat daerah dalam melakukan inventarisasi, pencatatan dan pelaporan aset pada Kartu Inventaris Barang tidak tertib dan kurang cermat	<ul style="list-style-type: none"> • Masing-masing Kepala Perangkat Daerah selaku pengguna barang agar menginstruksikan pengurus barang melakukan inventarisasi barang milik daerah minimal 1 kali dalam lima tahun kemudian hasilnya divalidasi dan dimutakhirkan pada SIMDA BMD • Pengurus barang seluruh OPD agar lebih cermat dalam melakukan pengisian informasi dan pemutakhiran data dalam SIMDA BMD terkait kondisi barang, nilai dan rincian barang

8	Masih terdapat selisih/perbedaan antara jumlah BPKP yang disampaikan oleh Perangkat Daerah dengan fisik BPKB yang tersimpan di BKAD	<ul style="list-style-type: none"> • Kepala Perangkat Daerah agar menyerahkan BPKB yang masih disimpan di instansinya kepada Pengelola Barang melalui pembantu Pengelola barang/BKAD dengan disertai dokumen tanda terima • Perlu dilaksanakan kegiatan rekonsiliasi antara Pengurus Barang dengan BKAD dalam melakukan validasi dan pemutakhiran data KIB B secara periodik untuk menelusuri selisih data kendaraan yang tercatat di SIMDA BMD, fisik kendaraan di OPD dan fisik BPKP yang tercatat di OPD dan BKAD
9	Penatausahaan dan pengelolaan aset lainnya / rusak masih belum tertib	Membentuk Tim Teknis untuk memverifikasi dan memvalidasi aset yang rusak berat agar diusulkan kepada Bupati untuk dihapuskan
10	Pemanfaatan Barang Milik Daerah oleh pihak lain belum tertib	<ul style="list-style-type: none"> • Melakukan inventarisasi serta melengkapi dokumen pemanfaatan atas BMD yang dimanfaatkan oleh pihak lain • Melakukan monitoring secara periodik atas jangka waktu pemanfaatan BMD dimaksud
11	Penatausahaan nomor register dan Kodefikasi Barang Milik Daerah tidak tertib	Seluruh Kepala Perangkat Daerah agar menginstruksikan pengurus barang untuk menertibkan nomor register, kode lokasi serta memasang nomor register pada fisik aset tetap untuk pengamanan
12	Kapitalisasi belum dilaksanakan sepenuhnya oleh perangkat daerah	Kepala Perangkat Daerah yang belum melaksanakan kapitalisasi aset agar menginstruksikan pengurus barang untuk melakukan penelusuran atas induk aset dan anak aset agar dapat melakukan proses kapitalisasi aset
13	<p>Terhambatnya proses pengalihan status penggunaan barang milik daerah perangkat daerah yang merger, gabung dan pisah yang disebabkan :</p> <p>a. Calon Pengguna Barang baru belum menyerahkan surat pernyataan kesediaan menerima barang</p> <p>b. Usulan Data BMD dari Pengguna Barang Lama yang tidak sesuai dengan data SIMDA</p>	<p>a. Koordinasi dengan pengguna barang baru agar segera menyerahkan surat pernyataan kesediaan menerima barang</p> <p>b. BKAD melakukan rekonsiliasi dengan pengurus barang, dan pengguna barang lama agar melakukan perbaikan data</p>
	c. Terdapat BMD yang tidak ada Perangkat Daerah yang mau menerima pengalihannya	c. Menghimpun dan mencatat data BMD yang tidak diterima oleh calon pengguna barang baru

Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.

Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) merupakan suatu dokumen perencanaan perangkat daerah yang erat kaitannya dengan proses yang akan dicapai dalam kurun waktu satu tahun, bagaimana yang perlu dilakukan agar tujuan tercapai sesuai visi, misi, dan program kepala daerah terpilih. Dengan perencanaan strategis diharapkan dapat dirumuskan tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Malang dengan **Visi Madep Mantep Manetep** yaitu Terwujudnya Kabupaten Malang yang Istiqomah dan memiliki mental bekerja keras guna mencapai kemajuan pembangunan yang bermanfaat nyata untuk rakyat berbasis pedesaan.

Memperhatikan visi dan misi pembangunan Kabupaten Malang sebagaimana yang tersirat pada RPJMD Kabupaten Malang tersebut, BKAD sebagai unsur staf mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan kebijakan daerah yang bersifat spesifik, yaitu di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah.

Berdasarkan Renja tersebut terdapat faktor penghambat dan pendorong penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat sesuai tugas pokok dan fungsi BKAD. Program Pembangunan pada misi ke 2 (dua) **Memperluas inovasi dan reformasi birokrasi demi tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, akuntabel dan demokratis berbasis teknologi informasi** terkait dengan misi tersebut Badan Keuangan Dan Aset Daerah berkomitmen untuk mewujudkan Pengelolaan Keuangan Daerah yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel serta mewujudkan pelayanan publik yang cepat, tepat, jelas dan dapat dipertanggungjawabkan. Misi tersebut diatas dijabarkan dalam program sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
6. Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa
7. Program Pengelolaan Perbendaharaan Pemerintah Daerah
8. Program Pengelolaan Asset Pemerintah Daerah

9. Program Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Anggaran Pemerintah Daerah
10. Program Peningkatan Pelaporan dan Akuntansi Pemerintah Daerah

TELAAHAN KINERJA BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Faktor-Faktor penghambat maupun faktor-faktor pendorong dari pelayanan Perangkat Daerah (PD) yang mempengaruhi permasalahan pelayanan PD jika ditinjau dari sasaran Rencana Kerja Badan Keuangan dan Aset Daerah untuk tahun 2017 :

Faktor Penghambat :

1. Adanya sebagian asset Pemerintah Kabupaten Malang yang riwayat perolehannya masih belum jelas
2. Sering terjadinya keterlambatan penyampaian pelaporan keuangan dari PD

Faktor Pendorong

1. Melakukan penelusuran inventarisasi identifikasi dan konsolidasi dengan PD sebagai pengguna barang
2. Perangkat Daerah dengan system website online dengan system pengelolaan keuangan dan barang milik daerah yang terpusat dan dibuat secara online
3. Semangat dan disiplin Kerja dari Staf BKAD, dengan semangat dan disiplin tinggi yang dimiliki oleh staf Badan Keuangan dan Aset Daerah mendorong staf untuk memberikan pelayanan yang optimal.
4. Adanya peluang pada staf untuk mengikuti pelatihan untuk peningkatan kinerja, dengan adanya kesempatan ini membuka peluang untuk meningkatkan dan mengoptimalkan Sumber Daya Manusia yang dimiliki untuk memberikan pelayanan yang maksimal.

PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS

Upaya keras yang baik berdampak pada efisiensi pengelolaan keuangan :

- a. Meningkatkan koordinasi dan komunikasi baik internal maupun eksternal agar dapat memberikan informasi yang lebih cepat dan tepat;
- b. Diharapkan dalam penyusunan APBD dan penyusunan Laporan Keuangan Daerah (LKD) dapat tepat waktu;

- c. Meningkatkan koordinasi dan komunikasi baik internal maupun eksternal agar dapat memberikan informasi yang lebih cepat dan tepat;
- d. Berkoordinasi dan rekonsiliasi data dengan PD terkait dengan pengelolaan keuangan dan aset daerah;
- e. Memberikan bimbingan teknis kepada Aparat Desa terkait dengan Pengelolaan APBDes;
- f. Profesionalisme dan disiplin aparatur daerah, kemampuan memfasilitasi, melayani dan bahkan mencari solusi juga merupakan faktor yang penting dalam mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang baik dan berkelanjutan;
- g. Kurang siapnya PD dalam penyusunan Laporan Keuangan berbasis akrual;

2.4. Review terhadap Rencana Kerja Pemerintah Daerah

Pada tabel 2.3 ini disajikan perbandingan antara Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2019 dengan analisis kebutuhan, alasan proses dilakukan dan temuan/catatan penting perbedaan. Terdapat Perbedaan jumlah anggaran antara Rencana Kerja Perangkat Daerah tahun 2019 dengan Hasil Analisis Kebutuhan dikarenakan ada Perbedaan jumlah anggaran pada Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2019 dengan Hasil Analisis Kebutuhan dikarenakan pada Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional di Tahun 2019 tidak dianggarkan.

Tabel 2.3
Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2019
Kabupaten Malang

NO	RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Ket.
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		Persentase Pemenuhan Operasional Perkantoran		72.144.966.562,00	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		Persentase Pemenuhan Operasional Perkantoran		63.896.367.700,00	
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	BKAD	Jumlah registrasi surat masuk dan surat keluar	10.000 buah	513.704.262,00	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	BKAD	Jumlah registrasi surat masuk dan surat keluar	10.000 buah	251.208.500,00	
2	Penyediaan Jasa Komunikasi,sumber daya air & listrik	BKAD	Jumlah Penyediaan listrik, Air Minum/Air bersih, telekomunikasi dan internet	36 rekening per bulan	52.500.000.000,00	Penyediaan Jasa Komunikasi,sumber daya air & listrik	KAB MALANG	Jumlah Penyediaan listrik, Air Minum/Air bersih, telekomunikasi dan internet	36 rekening/ bulan	52.510.000.000,00	
3	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	BKAD	Jumlah Pejabat Pengelola Administrasi Keuangan	12 OB	16.808.442.300,00	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	BKAD	Jumlah Pejabat Pengelola Administrasi Keuangan	12 OB	9.131.266.000,00	
4	Penyediaan Alat Tulis Kantor	BKAD	Jumlah alat tulis kantor yang disediakan	51 Jenis	624.240.000,00	Penyediaan Alat Tulis Kantor	BKAD	Jumlah alat tulis kantor yang disediakan	51 Jenis	199.953.900,00	
5	Penyediaan Barang Cetakan & Penggandaan	BKAD	Jumlah barang cetakan yang disediakan	41 Jenis	624.240.000,00	Penyediaan Barang Cetakan & Penggandaan	BKAD	Jumlah barang cetakan yang disediakan	41 Jenis	248.771.000,00	
6	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	BKAD	Jumlah Penyediaan Komponen alat-alat listrik dan elektronik	74 Jenis	260.100.000,00	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	BKAD	Jumlah Penyediaan Komponen alat-alat listrik dan elektronik	74 Jenis	315.358.000,00	
7	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	BKAD	Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan	200 Jenis	52.020.000,00	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	BKAD	Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan	200 Jenis	55.000.000,00	

NO	RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Ket.
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	Penyediaan Makanan & Minuman	BKAD	Jumlah makanan dan minuman harian pegawai, Rapat, dan tamu yang disediakan	36.768 HOK	260.100.000,00	Penyediaan Makanan & Minuman	BKAD	Jumlah makanan dan minuman harian pegawai, Rapat, dan tamu yang disediakan	36.770 HOK	283.412.000,00	
9	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	BKAD	Jumlah Pegawai memenuhi penugasan dinas ke luar daerah	200 HOK	208.080.000,00	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	KAB MALANG	Jumlah Pegawai memenuhi penugasan dinas ke luar daerah	200 HOK	378.260.000,00	
10	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke dalam Daerah	BKAD	Jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas ke dalam daerah	200 HOK	104.040.000,00	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke dalam Daerah	KAB MALANG	Jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas ke dalam daerah	200 HOK	270.590.000,00	
11	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - undangan	BKAD	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	6 Jenis	40.000.000,00	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - undangan	BKAD	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	6 Jenis	30.000.000,00	
12	Pengelolaan Administrasi Perkantoran dan Pengendalian Kepegawaian	BKAD	Jumlah Laporan Pengendalian Kepegawaian yang disusun secara Periodik	15 Dokumen	150.000.000,00	Pengelolaan Administrasi Perkantoran dan Pengendalian Kepegawaian	BKAD	Jumlah Laporan Pengendalian Kepegawaian yang disusun secara Periodik	15 Dokumen	222.548.300,00	
II	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Aparatur		1,248,480,000.00	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Aparatur		7,068,100,259.00	
1	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	BKAD	Jumlah Kendaraan Dinas / Operasional roda 2 baru yang diadakan	7 unit	3,242,545,500.00	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	KAB MALANG	Jumlah Kendaraan Dinas / Operasional roda 2 baru yang diadakan	0 Unit	3,242,545,500.00	
2	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	BKAD	Jumlah peralatan gedung kantor yang diadakan	180 jenis	520.200.000,00	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	KAB MALANG	Jumlah peralatan gedung kantor yang diadakan	180 jenis	1.823.470.759,00	
3	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	BKAD	Jumlah gedung kantor yang dipelihara rutin/berkala	14 jenis	260.100.000,00	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	BKAD	Jumlah gedung kantor yang dipelihara rutin/berkala	14 jenis	699.561.500,00	

NO	RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Ket.
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	Pemeliharaan Rutin /Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	BKAD	Jumlah kendaraan roda empat dan kendaraan roda dua yang dipelihara rutin dan berkala	64 unit	364.140.000,00	Pemeliharaan Rutin /Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	KAB MALANG	Jumlah kendaraan roda empat dan kendaraan roda dua yang dipelihara rutin dan berkala	64 unit	937.702.500,00	
5	Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor	BKAD	Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara rutin/berkala	188 jenis	104.040.000,00	Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor	BKAD	Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara rutin/berkala	188 jenis	364.820.000,00	
III	Program Peningkatan Disiplin Aparatur		Persentase Penunjang Kerja aparatur		6.000.000.000,00	Program Peningkatan Disiplin Aparatur		Persentase Penunjang Kerja aparatur		401.611.500,00	
1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	BKAD	Jumlah Penyediaan Pakaian Dinas	26.020 Stel	6.000.000.000,00	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	KAB MALANG	Jumlah Penyediaan Pakaian Dinas	125 Stel	401.611.500,00	
IV	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		Persentase peningkatan kapasitas pegawai di perangkat daerah		156.060.000,00	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		Persentase peningkatan kapasitas pegawai di perangkat daerah		386.310.000,00	
1	Pendidikan & Pelatihan Formal	BKAD	Jumlah pegawai yang mengikuti pelatihan	20 orang	156.060.000,00	Pendidikan & Pelatihan Formal	KAB MALANG	Jumlah pegawai yang mengikuti pelatihan	10 orang	386.310.000,00	
V	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja & Keuangan		Persentase dokumen perencanaan, laporan keuangan dan kinerja perangkat daerah yang tepat waktu		824.240.000,00	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja & Keuangan		Persentase dokumen perencanaan, laporan keuangan dan kinerja perangkat daerah yang tepat waktu		889.137.900,00	
1	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja & Ikhtisar Realiasi Kinerja PD	BKAD	Jumlah dokumen SAKIP	100 buku	200.000.000,00	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja & Ikhtisar Realiasi Kinerja PD	BKAD	Jumlah dokumen SAKIP	100 buku	181.195.500,00	
2	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	BKAD	Jumlah dokumen laporan keuangan semester I dan II	550 buku	520.200.000,00	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	BKAD	Jumlah dokumen laporan keuangan semester I dan II	550 buku	640.214.600,00	

NO	RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Ket.
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	BKAD	Jumlah dokumen laporan keuangan akhir	380 buku	104.040.000,00	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	BKAD	Jumlah dokumen laporan keuangan akhir	380 buku	67.727.800,00	
VI	Program Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Anggaran Pemerintah Daerah		Persentase Penyusunan, Pengendalian dan evaluasi Anggaran Pemerintah Daerah		3.972.797.000,00	Program Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Anggaran Pemerintah Daerah		Persentase Penyusunan, Pengendalian dan evaluasi Anggaran Pemerintah Daerah		4.647.560.500,00	
1	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang APBD	BKAD	Jumlah PERDA APBD sesuai kriteria dan tepat waktu	390 Dokumen	804.374.500,00	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang APBD	KAB MALANG	Jumlah PERDA APBD sesuai kriteria dan tepat waktu	390 Dokumen	755.061.500,00	
2	Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran APBD	BKAD	Jumlah rancangan peraturan KDH tentang penjabaran APBD	410 Dokumen	773.697.500,00	Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran APBD	KAB MALANG	Jumlah rancangan peraturan KDH tentang penjabaran APBD	410 Dokumen	704.242.500,00	
3	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan APBD	BKAD	Jumlah Perda Perubahan APBD sesuai kriteria	260 dokumen	748.801.000,00	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan APBD	KAB MALANG	Jumlah Perda Perubahan APBD sesuai kriteria	260 dokumen	753.163.000,00	
4	Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran Perubahan APBD	BKAD	Jumlah Perbub Penjabaran Perubahan APBD sesuai kriteria dan tepat waktu	560 dokumen	720.565.500,00	Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran Perubahan APBD	KAB MALANG	Jumlah Perbub Penjabaran Perubahan APBD sesuai kriteria dan tepat waktu	560 dokumen	652.565.500,00	
5	Peningkatan Pengelolaan Anggaran Daerah	BKAD	Jumlah Peserta sosialisasi peraturan perundang-undangan tentang pengelolaan keuangan daerah	164 orang	212.310.500,00	Peningkatan Pengelolaan Anggaran Daerah	KAB MALANG	Jumlah Peserta sosialisasi peraturan perundang-undangan tentang pengelolaan keuangan daerah	164 orang	941.602.500,00	

NO	RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Ket.
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	Peningkatan Pengelolaan belanja hibah dan bantuan sosial dari APBD	BKAD	Jumlah lampiran perbub tentang penjabaran APBD yang memuat daftar nama dan alamat calon penerima hibah dan bantuan sosial	500 dokumen	448.294.500,00	Peningkatan Pengelolaan belanja hibah dan bantuan sosial dari APBD	KAB MALANG	Jumlah lampiran perbub tentang penjabaran APBD yang memuat daftar nama dan alamat calon penerima hibah dan bantuan sosial	500 dokumen	404.080.500,00	
7	Analisa Pengelolaan Keuangan Daerah/Desa	BKAD	Jumlah buku hasil analisa sebagai acuan peningkatan penyusunan APBD yang berkualitas	200 buku	-	Analisa Pengelolaan Keuangan Daerah/Desa	BKAD	Jumlah buku hasil analisa sebagai acuan peningkatan penyusunan APBD yang berkualitas	200 buku	-	
8	Evaluasi dan Asistensi Penyusunan Rencana Kerja Anggaran PD dan Perubahan	BKAD	Jumlah PD yang dievaluasi dan dilakukan pendampingan dalam Penyusunan Perubahan RKA	82 PD	264.653.500,00	Evaluasi dan Asistensi Penyusunan Rencana Kerja Anggaran Perubahan PD	BKAD	Jumlah PD yang dievaluasi dan dilakukan pendampingan dalam Penyusunan Perubahan RKA	82 PD	436.845.000,00	
VII	Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa		Persentase Pemenuhan Pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa		936.360.000,00	Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa		Persentase Pemenuhan Pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa		997.383.500,00	
1	Pembinaan dan Fasilitasi Penyusun APBDes	BKAD	Jumlah peserta pembinaan dan fasilitasi penyusunan APBDes	1134 Aparatur Desa	468.180.000,00	Pembinaan dan Fasilitasi Penyusun APBDes	KAB MALANG	Jumlah peserta pembinaan dan fasilitasi penyusunan APBDes	1134 Aparatur Desa	630.767.500,00	
2	Penigkatan Penatausahaan Anggaran Desa	BKAD	Jumlah peserta kegiatan peningkatan penatausahaan anggaran desa	1134 Aparatur desa	468.180.000,00	Penigkatan Penatausahaan Anggaran Desa	KAB MALANG	Jumlah peserta kegiatan peningkatan penatausahaan anggaran desa	1134 Aparatur desa	366.616.000,00	
VIII	Program Pengelolaan Perbendaharaan Pemerintahan Daerah		Persentase Pengelolaan Perbendaharaan Pemerintah Daerah		2.796.960.000,00	Program Pengelolaan Perbendaharaan Pemerintahan Daerah		Persentase Pengelolaan Perbendaharaan Pemerintah Daerah		3.500.000.000,00	
1	Pengendalian dan Pelaporan berkala dana transfer	BKAD	Jumlah Pelaporan dana transfer yang dilaksanakan	82 buku	208.080.000,00	Pengendalian dan Pelaporan berkala dana transfer	KAB MALANG	Jumlah Pelaporan dana transfer yang dilaksanakan	82 buku	377.449.000,00	

NO	RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Ket.
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	pemerintah pusat dan pemerintah daerah					pemerintah pusat dan pemerintah daerah					
2	Peningkatan dan Pengendalian manajemen kas daerah	BKAD	Jumlah laporan kas yang seimbang sehingga tidak defisit	12 bulan	520.200.000,00	Peningkatan dan Pengendalian manajemen kas daerah	BKAD	Jumlah laporan kas yang seimbang sehingga tidak defisit	12 bulan	538.252.000,00	
3	Pengendalian dan Pembinaan Keuangan BLUD	BKAD	Jumlah BLUD yang dilakukan pembinaan terhadap pola pengelolaan keuangan terhadap PD yang menerapkan PPK-BLUD	15 BLUD	208.080.000,00	Pengendalian dan Pembinaan Keuangan BLUD	KAB MALANG	Jumlah BLUD yang dilakukan pembinaan terhadap pola pengelolaan keuangan terhadap PD yang menerapkan PPK-BLUD	15 BLUD	447.701.500,00	
4	Peningkatan Penatausahaan Belanja Daerah	BKAD	Jumlah penerbitan SP2D yang terselesaikan	13.000 berkas	520.200.000,00	Peningkatan Penatausahaan Belanja Daerah	BKAD	Jumlah penerbitan SP2D yang terselesaikan	13.000 berkas	739.776.000,00	
5	Pengelolaan Belanja Pegawai	BKAD	Jumlah penerbitan daftar gaji dan SKKP yang dikeluarkan	12 bulan	520.200.000,00	Pengelolaan Belanja Pegawai	BKAD	Jumlah penerbitan daftar gaji dan SKKP yang dikeluarkan	12 bulan	553.746.000,00	
6	Penanganan tuntutan Perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi	BKAD	Jumlah TPTGR yang terselesaikan khususnya dalam penerbitan SK Bupati Pembebanan, Pelunasan maupun penghapusan	123 dokumen	520.200.000,00	Penanganan tuntutan Perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi	KAB MALANG	Jumlah TPTGR yang terselesaikan khususnya dalam penerbitan SK Bupati Pembebanan, Pelunasan maupun penghapusan	123 dokumen	540.350.000,00	
7	Peningkatan Manajemen Investasi Daerah	BKAD	Jumlah laporan investasi daerah terhadap BUMD yang tersaji	75 buku	300.000.000,00	Peningkatan Manajemen Investasi Daerah	KAB MALANG	Jumlah laporan investasi daerah terhadap BUMD yang tersaji	75 buku	302.725.500,00	
IX	Program Peningkatan Pelaporan dan Akuntansi Pemerintah Daerah		Persentase Peningkatan Pelaporan dan akuntansi Pemerintah Daerah		3.724.807.000,00	Program Peningkatan Pelaporan dan Akuntansi Pemerintah Daerah		Persentase Peningkatan Pelaporan dan akuntansi Pemerintah Daerah		4.043.756.800,00	

NO	RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Ket.
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Monitoring dan Evaluasi Penatausahaan Keuangan Daerah	BKAD	Jumlah PD yang dievaluasi dalam penatausahaan keuangan sesuai kriteria	82 PD	600.000.000,00	Monitoring dan Evaluasi Penatausahaan Keuangan Daerah	BKAD	Jumlah PD yang dievaluasi dalam penatausahaan keuangan sesuai kriteria	82 PD	768.392.400,00	
2	Penyusunan Kebijakan Akuntansi Pemerintah daerah	BKAD	Jumlah buku pedoman kebijakan Akuntansi yang disusun	200 buku	100.000.000,00	Penyusunan Kebijakan Akuntansi Pemerintah daerah	BKAD	Jumlah buku pedoman kebijakan Akuntansi yang disusun	200 buku	94.583.400,00	
3	Penyusunan Sistem dan Prosedur pengelolaan Keuangan Daerah	BKAD	Jumlah buku sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah yang disusun	450 buku	200.000.000,00	Penyusunan Sistem dan Prosedur pengelolaan Keuangan Daerah	BKAD	Jumlah buku sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah yang disusun	450 buku	2.938.500,00	
4	Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	BKAD	Jumlah Perda Pertanggungjawaban APBD yang disusun	450 dokumen	915.763.000,00	Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	BKAD	Jumlah Perda Pertanggungjawaban APBD yang disusun	450 dokumen	920.683.000,00	
5	Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	BKAD	Jumlah Perbub Penjabaran Pertanggungjawaban APBD yang disusun	550 dokumen	909.044.000,00	Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	BKAD	Jumlah Perbub Penjabaran Pertanggungjawaban APBD yang disusun	550 dokumen	872.468.000,00	
6	Penyusunan sistem informasi pengelolaan keuangan daerah	BKAD	Jumlah aplikasi sistem informasi pengelolaan keuangan daerah	2 aplikasi	500.000.000,00	Penyusunan sistem informasi pengelolaan keuangan daerah	BKAD	Jumlah aplikasi sistem informasi pengelolaan keuangan daerah	2 aplikasi	728.080.000,00	

NO	RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Ket.
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	Bimbingan Teknis Implementasi Paket Regulasi tentang pengelolaan keuangan daerah	BKAD	Jumlah peserta bimtek pengelolaan keuangan daerah	164 orang	500.000.000,00	Bimbingan Teknis Implementasi Paket Regulasi tentang pengelolaan keuangan daerah	KAB MALANG	Jumlah peserta bimtek pengelolaan keuangan daerah	164 orang	656.611.500,00	
X	Program Pengelolaan Aset Pemerintah Daerah		Persentase Pengelolaan Aset Pemerintah Daerah		3.407.200.000,00	Program Pengelolaan Aset Pemerintah Daerah		Persentase Pengelolaan Aset Pemerintah Daerah		3.128.500.000,00	
1	Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	BKAD	Jumlah pedoman Standar Satuan Harga (SSH)	100 buku	520.200.000,00	Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	KAB MALANG	Jumlah pedoman Standar Satuan Harga (SSH)	100 buku	378.500.000,00	
2	Inventarisasi dan Validasi data barang milik daerah	BKAD	Jumlah laporan barang milik daerah yang inventarisir (PD)	82 PD	712.000.000,00	Inventarisasi dan Validasi data barang milik daerah	KAB MALANG	Jumlah laporan barang milik daerah yang inventarisir (PD)	82 PD	650.000.000,00	
3	Penatausahaan Penggunaan Barang Milik Daerah	BKAD	Jumlah Peraturan Daerah Pengelolaan Barang Milik Daerah yang tersusun	500 dokumen	831.250.000,00	Penyusunan Peraturan Daerah Pengelolaan Barang Milik Daerah	BKAD	Jumlah Peraturan Daerah Pengelolaan Barang Milik Daerah yang tersusun	500 dokumen	500.000.000,00	
4	Pengamanan Barang Milik daerah	BKAD	Jumlah Barang Milik daerah Yang dihapus/dipindahtanganan	82 PD	593.750.000,00	Pemindahtanganan dan penghapusan Barang Milik daerah	BKAD	Jumlah Barang Milik daerah Yang dihapus/dipindahtanganan	50 berkas	600.000.000,00	
5	Penatausahaan Pemanfaatan Barang Milik daerah	BKAD	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban BMD yang disusun	82 dokumen	450.000.000,00	Penyusunan Pertanggungjawaban laporan Barang Milik daerah	BKAD	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban BMD yang disusun	82 buku	500.000.000,00	
6	Penatausahaan Penghapusan Barang Milik daerah	BKAD	Jumlah status penggunaan BMD yang ditetapkan	82 PD	300.000.000,00	Penetapan status penggunaan BMD	KAB MALANG	Jumlah status penggunaan BMD yang ditetapkan	82 dokumen	500.000.000,00	
			JUMLAH		95.211.870.562,00					88.958.728.159,00	

c. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Pada kegiatan Musrenbang yang telah diadakan oleh Badan Perencanaan Kabupaten Malang belum ada usulan program/kegiatan dari masyarakat yang ditujukan pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Malang seperti yang ditera pada tabel 2.4 dibawah ini :

Tabel 2.4
Penelaah Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat Tahun 2019

NO	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	VOLUME	CATATAN
1	2	3	4	5	6

NIHIL

BAB III

TUJUAN, SASARAN RENCANA KERJA

3.1. Telaah Terhadap Kebijakan Nasional

Arah Kebijakan dari pada Badan Keuangan dan Aset Daerah adalah mengimplementasikan kebijakan pengelolaan keuangan yang terintegrasi dengan system Perencanaan, Pelaporan dan Pengawasan yang efektif.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja

Tujuan Renja Badan Keuangan dan Aset Daerah untuk meningkatkan kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah.

Setelah tujuan ditetapkan, maka langkah selanjutnya adalah menetapkan sasaran sebagai suatu hasil yang lebih spesifik dan terukur. Sasaran ini merupakan bagian internal dalam proses perencanaan stratejik. Fokus utama penentuan sasaran adalah tindakan dan alokasi sumber daya organisasi dalam kegiatan atau operasional organisasi. Oleh karena itu dalam menunjang tercapainya Sasaran tersebut diatas, maka Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Malang dirumuskan sasaran.

Sasaran Renja adalah meningkatnya pengelolaan keuangan daerah yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel.

CARA MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN

Cara mencapai tujuan dan sasaran merupakan faktor penting dalam proses perencanaan stratejik, karena didalamnya terkandung rencana yang menyeluruh dan terpadu mengenai upaya-upaya yang akan dilakukan Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Malang dalam menetapkan kebijakan, program operasional dan kegiatan dengan memperhatikan sumber daya yang ada serta pencermatan terhadap lingkungan strategis yang dihadapi.

Pemilihan strategi sebagai suatu proses pembuatan keputusan untuk memilih alternatif terbaik dalam upaya pencapaian tujuan dan sasaran dengan cara yang paling penting. Strategi ini akan memperjelas makna dan hakekat suatu rencana kerja khususnya sasaran tahunan dengan identifikasi rincian yang sifatnya spesifik tentang bagaimana sumber daya aparatur harus mengelolanya.

Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah untuk mencapai tujuan dan sasaran dilakukan melalui penetapan kebijakan dan program. Sebagai suatu alat strategi, kebijakan dan program akan memberikan arah bagi pencapaian tujuan dan sasaran dalam tahun anggaran.

3.3 PROGRAM DAN KEGIATAN

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2019 dan Prakiraan Maju Tahun 2020

Adapun program dan kegiatan Badan Keuangan dan Aset Daerah dalam 1 (satu) tahun ke depan yang disajikan dalam bentuk tabel 3.1 yang dirumuskan sebagai berikut :

I. PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN

dengan kegiatan :

1. **Penyediaan Jasa Surat menyurat**, kegiatan ini merupakan pendukung dalam kegiatan operasional pada masing-masing bidang dalam melaksanakan tupoksi sehari-hari utamanya dalam meningkatkan koordinasi baik di tingkat lingkungan Kabupaten maupun di tingkat Propinsi maupun ditingkat pusat dalam melaksanakan urusan umum;
2. **Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik** kegiatan komunikasi ini merupakan pendukung dalam kegiatan operasional bidang-bidang dalam melaksanakan tupoksi sehari-hari utamanya dalam meningkatkan koordinasi baik di tingkat Kabupaten maupun di tingkat Propinsi dan ditingkat pusat sedangkan sumber daya air dan listrik untuk memenuhi kebutuhan di lingkungan BKAD dan Sekretariat Daerah Kabupaten Malang
3. **Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan**, kegiatan ini berupa belanja Pegawai yang diperuntukkan untuk Honorarium PNS dan Non PNS dalam upaya mendukung tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah;
4. **Penyediaan Alat Tulis Kantor**, kegiatan ini merupakan pendukung Urusan Umum untuk melaksanakan tupoksi sehari-hari yang digunakan untuk belanja alat tulis kantor;

5. **Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan**, kegiatan ini merupakan pendukung Urusan Umum untuk melaksanakan tupoksi sehari-hari yang digunakan untuk cetak dan penggandaan;
6. **Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor**, kegiatan ini digunakan untuk pengadaan belanja modal instalasi listrik dan telepon;
7. **Penyediaan Bahan Logistik Kantor**, kegiatan ini digunakan kesediaan bahan logistik dalam kelancaran kinerja Badan Keuangan dan Aset Daerah;
8. **Penyediaan Makanan dan Minuman**, kegiatan ini digunakan untuk belanja makan minum rapat dan makan minum tamu, serta makan minum pegawai;
9. **Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah**, kegiatan ini digunakan untuk belanja perjalanan badan dan akomodasi keluar daerah;
10. **Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah**, kegiatan ini digunakan untuk belanja perjalanan badan dan akomodasi dalam daerah;
11. **Penyediaan bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan**, Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan wawasan SDM Badan Keuangan Dan Aset Daerah.
12. **Pengelolaan Administrasi Perkantoran dan Pengendalian Kepegawaian**, kegiatan ini digunakan untuk terlaksananya tertib Administrasi dan Tata Laksana dan Surat Menyurat serta pengendalian kepegawaian

II. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR

dengan kegiatan :

1. **Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional**, Kegiatan ini bertujuan untuk menunjang kelancaran operasional kantor.
2. **Pengadaan Peralatan Gedung Kantor**, kegiatan ini dititik beratkan pada belanja modal pengadaan peralatan perkantoran, pengadaan perlengkapan kantor, mebelair, alat-alat elektro, alat komunikasi;

3. **Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor**, tujuan kegiatan ini adalah untuk mendukung kinerja operasional kegiatan dan mempertahankan kegunaan dari sarana dan prasarana;
4. **Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional**, Tujuan kegiatan ini adalah untuk mendukung kinerja operasional kegiatan dan mempertahankan kegunaan kendaraan badan/operasional;
5. **Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor**, Tujuan kegiatan ini adalah untuk mendukung kinerja operasional kegiatan dan mempertahankan kegunaan Peralatan Gedung Kantor.

III. PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR dengan kegiatan :

1. **Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya**, tujuan kegiatan ini adalah untuk pengadaan seragam pakaian dinas agar dapat terwujud aparatur yang disiplin pada saat melakukan kedinasan.

IV. PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR

dengan kegiatan :

1. **Pendidikan dan Pelatihan Formal**, tujuan kegiatan ini adalah untuk mengirimkan staf dalam kursus-kursus singkat/pelatihan, mengikuti sosialisasi, dan mengikuti bimbingan teknis. Asistensi Perencanaan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) ini dimasukkan dalam sub kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal dengan menunjuk Pocal Poin Responsif Gender. Sehingga Badan Keuangan dan Aset Daerah menjadi Perangkat Daerah yang ikut mendukung Kabupaten Malang sebagai salah satu Kabupaten Layak Anak.

V. PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN dengan kegiatan :

1. **Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Badan Keuangan dan Aset Daerah**, tujuan kegiatan ini adalah untuk membuat laporan Capaian Kinerja yang nantinya dapat dipergunakan sebagai bahan evaluasi guna perencanaan kegiatan selanjutnya;

2. **Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran**, tujuan kegiatan ini adalah untuk membuat laporan Capaian Kinerja yang nantinya dapat dipergunakan sebagai bahan laporan semester. Dan memenuhi ketentuan peraturan perundangan yang berlaku;
3. **Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun**, tujuan kegiatan ini adalah untuk membuat laporan Capaian Kinerja yang nantinya dapat dipergunakan sebagai bahan laporan tahunan. Dan memenuhi ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

VI. PROGRAM PENYUSUNAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH dengan kegiatan :

1. Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD, tujuan kegiatan ini adalah untuk menyediakan bahan dalam rangka penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
2. Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, tujuan kegiatan ini adalah untuk menyediakan bahan dalam rangka penyusunan Rancangan Penjabaran Peraturan Kepala Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
3. Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, tujuan kegiatan ini adalah untuk menyediakan bahan dalam rangka penyusunan Rancangan Peraturan daerah tentang perubahan APBD;
4. Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, tujuan kegiatan ini adalah untuk menyediakan bahan dalam rangka penyusunan Rancangan Penjabaran Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
5. Peningkatan Pengelolaan Anggaran Daerah; tujuan kegiatan untuk mensosialisasi Peraturan Perundang-undangan tentang Pengelolaan keuangan Daerah bagi PD;
6. Peningkatan Pengelolaan Belanja Hibah dan Bantuan Sosial dari APBD, tujuan kegiatan untuk memonitoring belanja hibah dan bantuan sosial;

7. Evaluasi dan Asistensi Penyusunan Rencana Kerja Anggaran PD dan Perubahannya, tujuan kegiatan untuk mengevaluasi dan melakukan pendampingan bagi PD dalam rangka penyusunan RKA dan Perubahannya;

VII. PROGRAM PEMBINAAN DAN FASILITASI PENGELOLAAN KEUANGAN DESA dengan kegiatan :

1. Pembinaan dan Fasilitasi Penyusun APBDes, tujuan kegiatan untuk memberikan pembinaan dan fasilitasi pada aparat Pemerintah desa dalam rangka penyusunan APBDes;
2. Peningkatan Penatausahaan Anggaran desa, tujuan kegiatan untuk mewujudkan tertib administrasi penatausahaan anggaran desa;

VIII. PROGRAM PENINGKATAN PELAPORAN DAN AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH dengan kegiatan :

1. **Monitoring dan Evaluasi Penatausahaan Keuangan Daerah**, tujuan kegiatan untuk mengevaluasi Perangkat Daerah dalam penatausahaan keuangan daerah;
2. **Penyusunan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah**, tujuan kegiatan ini adalah untuk memberikan serta mendukung penatausahaan keuangan daerah;
3. **Penyusunan Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah**, tujuan ini adalah untuk memberikan serta mendukung mekanisme pengelolaan Keuangan agar bisa efektif, efisien dan Akuntabel;
4. **Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah**, tujuan kegiatan ini adalah untuk menyediakan bahan dalam rangka penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD;
5. **Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah**, tujuan kegiatan ini adalah untuk menyediakan bahan dalam rangka penyusunan Rancangan Penjabaran Peraturan Kepala Daerah tentang Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
6. **Penyusunan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah**, tujuan kegiatan ini adalah untuk meningkatkan Informasi

Pengelolaan Keuangan Daerah sehingga dapat mempermudah penyusunan dan aksesibilitas Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

7. **Bimbingan Teknis Implementasi Paket Regulasi Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah**, tujuan kegiatan ini adalah Bimtek Pengelolaan Keuangan untuk PD;

IX. PROGRAM PENGELOLAAN PERBENDAHARAAN PEMERINTAH DAERAH dengan kegiatan :

1. **Pengendalian dan Pelaporan Berkala Dana Transfer Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah**, tujuan kegiatan untuk melakukan koordinasi dan Pelaporan dana-dana transfer yang telah direalisasikan serta menyusun rekonsiliasi;
2. **Peningkatan dan Pengendalian Manajemen Kas Daerah**, tujuan kegiatan ini adalah untuk membuat administrasi Penatausahaan Keuangan Kas Daerah dengan Bank Jatim sebagai pemegang Kas Daerah;
3. **Pengendalian dan Pembinaan Keuangan BLUD**, tujuan Kegiatan ini adalah untuk mendukung serta melakukan pembinaan administrasi Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
4. **Peningkatan Penatausahaan Belanja Daerah**, Tujuan kegiatan ini mewujudkan tertib administrasi Penatausahaan belanja daerah;
5. **Pengelolaan Belanja Pegawai**, Kegiatan ini untuk mendukung dan meningkatkan data-data pegawai khususnya penatausahaan pembayaran gaji pegawai serta data – data administrasi;
6. **Penanganan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi**, Kegiatan ini diperlukan dalam rangka menyelesaikan permasalahan yang menyangkut Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (TP-TGR) khususnya dalam penerbitan Surat Ketetapan Tanggungjawab Mutlak (SKTJM), Surat Ketetapan Pembebanan, Surat Ketetapan Pelunasan maupun Surat Ketetapan Penghapusan;
7. **Peningkatan Manajemen Investasi Daerah**, tujuan kegiatan ini adalah untuk meningkatkan manajemen investasi daerah terhadap BUMD.

X. PROGRAM PENGELOLAAN ASET PEMERINTAH DAERAH dengan kegiatan :

1. **Inventarisasi Barang Milik Daerah**, tujuan kegiatan ini untuk mewujudkan laporan Barang Milik Daerah yang akurat;
2. **Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah**, tujuan kegiatan ini untuk menyusun Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah;
3. **Inventarisasi dan Validasi Data Barang Milik Daerah**, tujuan kegiatan ini untuk menginventarisir dan memvalidasi data BMD;
4. **Penatausahaan Penggunaan BMD**, tujuan kegiatan ini untuk tertib administrasi dalam penatausahaan penggunaan BMD;
5. **Pengamanan BMD**, tujuan kegiatan ini adalah untuk mengamankan Barang Milik Daerah;
6. **Penatausahaan Pemanfaatan BMD**, tujuan kegiatan ini tertib administrasi dalam penatausahaan dan pemanfaatan BMD;
7. **Penatausahaan Penghapusan Barang Milik Daerah**, tujuan kegiatan ini untuk penerbitan SK Bupati sebagai pengguna Barang Milik Daerah.

Tabel 3.1
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2019 dan Perkiraan Maju Tahun 2020
Badan Keuangan dan Aset Daerah

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Prakiran Maju Rencana Tahun 2020		Ket
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
I	Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Keuangan Daserah									
I	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Pemenuhan Operasional Perkantoran (%)		100%	63.896.367.700,00	PAD		100%	72.534.065.893,00	
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah registrasi surat masuk dan surat keluar (buah)	Kantor BKAD	10 000 Buah	251.208.500,00	PAD		10.000 Buah	523.978.347,00	
2	Penyediaan Jasa Komunikasi,sumber daya air & listrik	Jumlah Penyediaan Listrik, Air Minum/Air Bersih, Telekomunikasi dan Internet (Bulan)	Kabupaten Malang	36 Rekening /bulan	52.510.000.000,00	PAD		36 Rekening /bulan	52.500.000.000,00	
3	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah pejabat pengelola administrasi keuangan (OB)	Kabupaten Malang	12 OB	9.131.266.000,00	PAD		12 OB	17.144.611.146,00	
4	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah alat tulis kantor yang	Kantor BKAD	51 Jenis	199.953.900,00	PAD		51 Jenis	636.724.800,00	

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Prakiran Maju Rencana Tahun 2020		Ket
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
		disediakan (Jenis)								
5	Penyediaan Barang Cetak & Penggandaan	Jumlah barang cetakan yang disediakan (Jenis)	Kantor BKAD	41 jenis	248.771.000,00	PAD		41 jenis	636.724.800,00	
6	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah penyediaan komponen alat-alat listrik dan elektronik (Jenis)	Kantor BKAD	74 jenis	315.358.000,00	PAD		74 jenis	265.302.000,00	
7	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan (jenis)	Kantor BKAD	200 jenis	55.000.000,00	PAD		200 jenis	53.060.400,00	
8	Penyediaan Makanan & Minuman	Jumlah makanan dan minuman harian Pegawai, Rapat, dan tamu yang disediakan (HOK)	Kantor BKAD	36770 HOK	283.412.000,00	PAD		36.770 HOK	265.302.000,00	
9	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas ke luar daerah (HOK)	Kantor BKAD	200 HOK	378.260.000,00	PAD		200 HOK	212.241.600,00	
10	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke dalam Daerah	Jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas ke dalam daerah (HOK)	Kantor BKAD	200 HOK	270.590.000,00	PAD		200 HOK	106.120.800,00	
11	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Kantor BKAD	6 Jenis	30.000.000,00			6 Jenis	40.000.000,00	

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Prakiran Maju Rencana Tahun 2020		Ket
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
		yang disediakan (jenis)								
12	Pengelolaan Administrasi Perkantoran dan Pengendalian Kepegawaian	Jumlah Laporan Pengendalian Kepegawaian yang Disusun Secara Periodik (Buah)	Kantor BKAD	15 Dokumen	222.548.300,00	PAD		15 Dokumen	150.000.000,00	
II	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Aparatur (%)		100%	7.068.100.305,00			100%	1.273.449.600,00	
1	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Kendaraan Dinas/operasional roda 2 baru yang diadakan (unit)	Kantor BKAD	6 unit	3.242.545.500,00	PAD		-	-	
2	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang diadakan (jenis)	Kabupaten Malang	180 Unit	1.823.470.805,00	PAD		180 Unit	530.604.000,00	
3	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara Rutin/Berkala (jenis)	Kantor BKAD	14 Jenis	699.561.500,00	PAD		14 Jenis	265.302.000,00	

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Prakiran Maju Rencana Tahun 2020		Ket
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
4	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan roda empat dan kendaraan roda dua yang dipelihara rutin dan berkala (Unit)	Kabupaten Malang	64 Unit	937.702.500,00	PAD		64 Unit	371.422.800,00	
5	Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantoryang dipelihara Rutin/Berkala (jenis)	Kantor BKAD	188 Unit	364.820.000,00	PAD		188 Unit	106.120.800,00	
III	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Penunjang Kerja Aparatur (%)		100%	401.611.500,00			100%	6.000.000.000,00	
1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah penyediaan Pakaian Dinas (Stel)	Kabupaten Malang	125 Stel	401.611.500,00	PAD		20.000 stel	6.000.000.000,00	
IV	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Peningkatan Kapasitas Pegawai di Perangkat Daerah (%)		100%	386.310.000,00			100%	159.181.200,00	
1	Pendidikan & Pelatihan Formal	Jumlah Pegawai yang mengikuti pelatihan (orang)	Kantor BKAD	20 orang	386.310.000,00	PAD		10 orang	159.181.200,00	

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Prakiran Maju Rencana Tahun 2020		Ket
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
V	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja & Keuangan	Persentase Dokumen Perencanaan, Laporan Keuangan dan Kinerja Perangkat Daerah yang Tepat Waktu (%)		100%	889.137.000,00			100%	786.724.800,00	
1	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja & Ikhtisar Realiasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Kinerja (LKJ-IP/Profile Kinerja PD/Survei Kepuasan Masyarakat) (Buku)	Kantor BKAD	100 Buku	181.195.500,00	PAD		100 Buku	150.000.000,00	
2	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	Jumlah dokumen laporan keuangan semester I dan semester II (Buku)	Kantor BKAD	550 Buku	640.214.600,00	PAD		550 Buku	530.604.000,00	
3	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah dokumen laporan keuangan akhir (Buku)	Kantor BKAD	380 Buku	67.727.800,00	PAD		380 Buku	106.120.800,00	
4	Survei Kepuasan Masyarakat	Jumlah Laporan Survei Kepuasan Masyarakat (Buah)	Kantor BKAD	1 Kegiatan	0,00	PAD		-	-	

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Prakiran Maju Rencana Tahun 2020		Ket
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
VI	Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Persentase pemenuhan pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa		1134 Aparatur Desa	997.383.500,00			1134 Aparatur Desa	955.087.200,00	
1	Pembinaan dan Fasilitasi Penyusunan APBDes	Jumlah peserta pembinaan dan fasilitasi penyusunan APBDes (Aparatur Desa)	Kabupaten Malang	1134 Aparatur Desa	630.767.500,00	PAD		1134 Aparatur Desa	477.543.600,00	
2	Peningkatan Penatausahaan Anggaran Desa	Jumlah peserta kegiatan peningkatan penatausahaan anggaran desa (Aparatur Desa)	Kabupaten Malang	1134 Aparatur Desa	366.616.000,00	PAD		1134 Aparatur Desa	477.543.600,00	

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Prakiran Maju Rencana Tahun 2020		Ket
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
VII	Program Pengelolaan Perbendaharaan Pemerintah Daerah	Persentase pengelolaan perbendaharaan pemerintah daerah		100%	3.500.000.000,00			100%	2.846.899.200,00	
1	Pengendalian dan Pelaporan Berkala Dana Transfer Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah	Jumlah pelaporan dana transfer yang dilaksanakan (buku)	Kantor BKAD	82 Buku	377.449.000,00	PAD		82 Buku	212.241.600,00	
2	Peningkatan dan Pengendalian Manajemen Kas Daerah	Jumlah laporan kas yang seimbang sehingga tidak defisit	Kantor BKAD	12 Bulan	538.252.000,00	PAD		12 Bulan	530.604.000,00	
3	Pengendalian dan Pembinaan Keuangan BLUD	Jumlah BLUD yang dilakukan pembinaan terhadap pola pengelolaan keuangan terhadap PD yang menerapkan PPK-BLUD	Kantor BKAD	15 BLUD	447.701.500,00	PAD		15 BLUD	221.241.600,00	
4	Peningkatan Penatausahaan Belanja Daerah	Jumlah penerbitan SP2D yang terselesaikan (berkas)	Kantor BKAD	13000 Berkas	739.776.000,00	PAD		13000 Berkas	530.604.000,00	

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Prakiran Maju Rencana Tahun 2020		Ket
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
5	Pengelolaan Belanja Pegawai	Jumlah penerbitan daftar gaji dan SKKP yang dikeluarkan	Kantor BKAD	12 Bulan	553.746.000,00	PAD		12 Bulan	530.604.000,00	
6	Penanganan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi	Jumlah TPTGR yang terselesaikan khususnya dalam penerbitan SK bupati pembebanan, pelunasan maupun penghapusan	Kantor BKAD	123 Dokumen	540.350.000,00	PAD		123 Dokumen	530.604.000,00	
7	Peningkatan Manajemen investasi Daerah	Jumlah Laporan investasi daerah terhadap BUMD yang tersaji (buku)	Kantor BKAD	75 Buku	302.725.500,00	PAD		75 buku	300.000.000,00	
VIII	Program Pengelolaan Asset Pemerintah Daerah	Persentase pengelolaan aset pemerintah daerah		60%	3.128.500.000,00			60%	3.417.604.000,00	
1	Inventarisasi Barang Milik Daerah	Tercapainya laporan barang milik daerah yang akurat	Kantor BKAD	-	-	PAD		-	-	
2	Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah pedoman standar satuan harga (SSH)	Kantor BKAD	100 Buku	378.500.000,00	PAD		100 Buku	530.604.000,00	

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Prakiran Maju Rencana Tahun 2020		Ket
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
3	Inventarisasi dan Validasi Data Barang Milik Daerah	Jumlah laporan barang milik daerah yang inventarisir (PD)	Kantor BKAD	82 PD	650.000.000,00	PAD		82 PD	712.000.000,00	
4	Penatausahaan Penggunaan BMD	Jumlah Penggunaan BMD yang sudah dibuat SK (dokumen)	Kantor BKAD	500 Dokumen	500.000.000,00	PAD		500 Dokumen	831.250.000,00	
5	Pengamanan BMD	Jumlah BMD yang diamankan (buku)	Kantor BKAD	82 Buku	600.000.000,00	PAD		50 Berkas	593.750.000,00	
6	Penatausahaan Pemanfaatan BMD	Jumlah BMD yang dimanfaatkan (dokumen)	Kantor BKAD	82 Dokumen	500.000.000,00	PAD		82 Dokumen	450.000.000,00	
7	Penatausahaan Penghapusan BMD	Jumlah BMD yang dihapuskan (PD)	Kantor BKAD	82 PD	500.000.000,00	PAD		82 PD	300.000.000,00	

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Prakiran Maju Rencana Tahun 2020		Ket
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
IX	Program Penyusunan , Pengendalian dan Evaluasi Anggaran Pemerintah Daerah	Persentase Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Anggaran Pemerintah Daerah (%)		100%	4.647.560.500,00			100%	3.972.797.000,00	
1	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang APBD	Jumlah Perda APBD sesuai kriteria dan tepat waktu (Dokumen)	Kantor BKAD	390 Dokumen	755.061.500,00	PAD		390 Dokumen	804.374.500,00	
2	Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran APBD	Jumlah Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran APBD (Dokumen)	Kabupaten Malang	410 Dokumen	704.242.500,00	PAD		410 Dokumen	773.697.500,00	
3	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan APBD	Jumlah Perda Perubahan APBD sesuai kriteria (Dokumen)	Kabupaten Malang	260 Dokumen	753.163.000,00	PAD		260 Dokumen	748.801.000,00	
4	Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Perbub Penjabaran Perubahan APBD sesuai kriteria dan tepat waktu (Dokumen)	Kabupaten Malang	560 Dokumen	652.565.500,00	PAD		560 Dokumen	720.665.500,00	

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Prakiran Maju Rencana Tahun 2020		Ket
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
5	Peningkatan Pengelolaan Anggaran Daerah	Jumlah Peserta sosialisasi peraturan perundang-undangan tentang pengelolaan keuangan daerah (Orang)	Kabupaten Malang	164 Orang	941.602.500,00	PAD		164 Orang	212.310.500,00	
6	Peningkatan Pengelolaan Belanja Hibah dan Bantuan Sosial dari APBD	Jumlah Lampiran Perbub Tentang Penjabaran APBD yang memuat daftar nama dan alamat calon penerima hibah dan bantuan sosial (Dokumen)	Kabupaten Malang	500 Dokumen	404.080.500,00	PAD		500 Dokumen	448.294.500,00	
7	Evaluasi dan Asistensi Penyusunan Rencana Kerja Anggaran PD dan Perubahannya	Jumlah PD yang dievaluasi dan dilakukan pendampingan dalam pembuatan RKA (PD) dan perubahannya	Kantor BKAD	82 PD	436.845.000,00	PAD		82 PD	264.653.500,00	

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Prakiran Maju Rencana Tahun 2020		Ket
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
X	Program Peningkatan Pelaporan dan Akuntansi Pemerintah Daerah	Persentase peningkatan pelaporan dan akuntansi pemerintah daerah		100%	4.043.756.800,00			100%	3.724.807.000,00	
1	Monitoring dan Evaluasi Penatausahaan Keuangan Daerah	Jumlah PD yang dievaluasi dalam penatausahaan keuangan sesuai kriteria	Kabupaten Malang	82 PD	768.392.400,00	PAD		82 PD	600.000.000,00	
2	Penyusunan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah	Jumlah Buku Pedoman Kebijakan akuntansi yang disusun	Kabupaten Malang	200 Buku	94.583.400,00	PAD		200 Buku	100.000.000,00	
3	Penyusunan Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah	Jumlah buku sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah yang disusun	Kabupaten Malang	450 Buku	2.938.500,00	PAD		450 Buku	200.000.000,00	
4	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah Perda Pertanggungjawaban APBD yang disusun (dokumen)	Kabupaten Malang	450 Dokumen	920.683.000,00	PAD		450 Dokumen	915.763.000,00	

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Prakiran Maju Rencana Tahun 2020		Ket
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
5	Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah Perbub Penjabaran Pertanggungjawaban APBD yang disusun (Dokumen)	Kabupaten Malang	550 Dokumen	872.468.000,00	PAD		550 Dokumen	909.044.000,00	
6	Penyusunan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah	Jumlah aplikasi sistem informasi pengelolaan keuangan daerah (aplikasi)	Kabupaten Malang	2 Aplikasi	728.080.000,00	PAD		2 Aplikasi	500.000.000,00	
7	Bimbingan Teknis Implementasi Paket Regulasi tentang Pengelolaan Keuangan Daerah	Jumlah peserta bimtek pengelolaan keuangan daerah (orang)	Kabupaten Malang	164 Orang	656.611.500,00	PAD		164 Orang	500.000.000,00	
	JUMLAH TOTAL				88.958.728.205,00				95.670.615.893,00	

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana Kerja Pendanaan Badan Keuangan dan Aset Daerah, saat ini sudah sesuai dengan pagu dan anggaran yang ditetapkan dalam RKPD yang tertuang dalam tabel 4.1

Tabel 4.1
 Rumusan Rencana Program/Kegiatan Tahun 2019 dan Perkiraan Maju Tahun 2020
 Badan Keuangan dan Aset Daerah

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
I	Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Keuangan Daserah						
I	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Pemenuhan Operasional Perkantoran (%)		100%	63.896.367.700,00	PAD	
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah registrasi surat masuk dan surat keluar (buah)	Kantor BKAD	10 000 Buah	251.208.500,00	PAD	

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
2	Penyediaan Jasa Komunikasi,sumber daya air & listrik	Jumlah Penyediaan Listrik, Air Minum/Air Bersih, Telekomunikasi dan Internet (Bulan)	Kabupaten Malang	36 Rekening/bulan	52.510.000.000,00	PAD	
3	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah pejabat pengelola administrasi keuangan (OB)	Kabupaten Malang	12 OB	9.131.266.000,00	PAD	
4	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah alat tulis kantor yang disediakan (Jenis)	Kantor BKAD	51 Jenis	199.953.900,00	PAD	
5	Penyediaan Barang Cetak dan Pengerjaan	Jumlah barang cetakan yang disediakan (Jenis)	Kantor BKAD	41 jenis	248.771.000,00	PAD	

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
6	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah penyediaan komponen alat-alat listrik dan elektronik (Jenis)	Kantor BKAD	74 jenis	315.358.000,00	PAD	
7	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan (jenis)	Kantor BKAD	200 jenis	55.000.000,00	PAD	
8	Penyediaan Makanan & Minuman	Jumlah makanan dan minuman harian Pegawai, Rapat, dan tamu yang disediakan (HOK)	Kantor BKAD	36770 HOK	283.412.000,00	PAD	
9	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas ke luar daerah (HOK)	Kantor BKAD	200 HOK	378.260.000,00	PAD	
10	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke dalam Daerah	Jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas ke dalam daerah (HOK)	Kantor BKAD	200 HOK	270.590.000,00	PAD	
11	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan (jenis)	Kantor BKAD	6 Jenis	30.000.000,00		
12	Pengelolaan Administrasi Perkantoran dan Pengendalian Kepegawaian	Jumlah Laporan Pengendalian Kepegawaian yang Disusun Secara Periodik (Buah)	Kantor BKAD	15 Dokumen	222.548.300,00	PAD	

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
II	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Aparatur (%)		100%	7.068.100.305,00		
1	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Kendaraan Dinas/operasional roda 2 baru yang diadakan (unit)	Kantor BKAD	6 unit	3.242.545.500,00	PAD	
2	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang diadakan (jenis)	Kabupaten Malang	180 Unit	1.823.470.805,00	PAD	
3	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara Rutin/Berkala (jenis)	Kantor BKAD	14 Jenis	699.561.500,00	PAD	
4	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan roda empat dan kendaraan roda dua yang dipelihara rutin dan berkala (Unit)	Kabupaten Malang	64 Unit	937.702.500,00	PAD	
5	Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantoryang dipelihara Rutin/Berkala (jenis)	Kantor BKAD	188 Unit	364.820.000,00	PAD	

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
III	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Penunjang Kerja Aparatur (%)		100%	401.611.500,00		
1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah penyediaan Pakaian Dinas (Stel)	Kabupaten Malang	125 Stel	401.611.500,00	PAD	
IV	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Peningkatan Kapasitas Pegawai di Perangkat Daerah (%)		100%	386.310.000,00		
1	Pendidikan & Pelatihan Formal	Jumlah Pegawai yang mengikuti pelatihan (orang)	Kantor BKAD	20 orang	386.310.000,00	PAD	
V	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja & Keuangan	Persentase Dokumen Perencanaan, Laporan Keuangan dan Kinerja Perangkat Daerah yang Tepat Waktu (%)		100%	889.137.000,00		

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja & Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Kinerja (LKJ-IP/Profile Kinerja PD/Survei Kepuasan Masyarakat) (Buku)	Kantor BKAD	100 Buku	181.195.500,00	PAD	
2	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	Jumlah dokumen laporan keuangan semester I dan semester II (Buku)	Kantor BKAD	550 Buku	640.214.600,00	PAD	
3	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah dokumen laporan keuangan akhir (Buku)	Kantor BKAD	380 Buku	67.727.800,00	PAD	
4	Survei Kepuasan Masyarakat	Jumlah Laporan Survei Kepuasan Masyarakat (Buah)	Kantor BKAD	1 Kegiatan	0,00	PAD	
VI	Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Persentase pemenuhan pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa		1134 Aparatur Desa	997.383.500,00		

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Pembinaan dan Fasilitasi Penyusunan APBDes	Jumlah peserta pembinaan dan fasilitasi penyusunan APBdes (Aparatur Desa)	Kabupaten Malang	1134 Aparatur Desa	630.767.500,00	PAD	
2	Peningkatan Penatausahaan Anggaran Desa	Jumlah peserta kegiatan peningkatan penatausahaan anggaran desa (Aparatur Desa)	Kabupaten Malang	1134 Aparatur Desa	366.616.000,00	PAD	
VII	Program Pengelolaan Perbendaharaan Pemerintah Daerah	Persentase pengelolaan perbendaharaan pemerintah daerah		100%	3.500.000.000,00		
1	Pengendalian dan Pelaporan Berkala Dana Transfer Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah	Jumlah pelaporan dana transfer yang dilaksanakan (buku)	Kantor BKAD	82 Buku	377.449.000,00	PAD	

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
2	Peningkatan dan Pengendalian Manajemen Kas Daerah	Jumlah laporan kas yang seimbang sehingga tidak defisit	Kantor BKAD	12 Bulan	538.252.000,00	PAD	
3	Pengendalian dan Pembinaan Keuangan BLUD	Jumlah BLUD yang dilakukan pembinaan terhadap pola pengelolaan keuangan terhadap PD yang menerapkan PPK-BLUD	Kantor BKAD	15 BLUD	447.701.500,00	PAD	
4	Peningkatan Penatausahaan Belanja Daerah	Jumlah penerbitan SP2D yang terselesaikan (berkas)	Kantor BKAD	13000 Berkas	739.776.000,00	PAD	
5	Pengelolaan Belanja Pegawai	Jumlah penerbitan daftar gaji dan SKKP yang dikeluarkan	Kantor BKAD	12 Bulan	553.746.000,00	PAD	
6	Penanganan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi	Jumlah TPTGR yang terselesaikan khususnya dalam penerbitan SK bupati pembebanan, pelunasan maupun penghapusan	Kantor BKAD	123 Dokumen	540.350.000,00	PAD	

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
7	Peningkatan Manajemen investasi Daerah	Jumlah Laporan investasi daerah terhadap BUMD yang tersaji (buku)	Kantor BKAD	75 Buku	302.725.500,00	PAD	
VIII	Program Pengelolaan Asset Pemerintah Daerah	Persentase pengelolaan aset pemerintah daerah		60%	3.128.500.000,00		
1	Inventarisasi Barang Milik Daerah	Tercapainya laporan barang milik daerah yang akurat	Kantor BKAD	-	-	PAD	
2	Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah pedoman standar satuan harga (SSH)	Kantor BKAD	100 Buku	378.500.000,00	PAD	
3	Inventarisasi dan Validasi Data Barang Milik Daerah	Jumlah laporan barang milik daerah yang inventarisir (PD)	Kantor BKAD	82 PD	650.000.000,00	PAD	
4	Penatausahaan Penggunaan BMD	Jumlah Penggunaan BMD yang sudah dibuat SK (dokumen)	Kantor BKAD	500 Dokumen	500.000.000,00	PAD	

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
5	Pengamanan BMD	Jumlah BMD yang diamankan (buku)	Kantor BKAD	82 Buku	600.000.000,00	PAD	
6	Penatausahaan Pemanfaatan BMD	Jumlah BMD yang dimanfaatkan (dokumen)	Kantor BKAD	82 Dokumen	500.000.000,00	PAD	
7	Penatausahaan Penghapusan BMD	Jumlah BMD yang dihapuskan (PD)	Kantor BKAD	82 PD	500.000.000,00	PAD	
IX	Program Penyusunan , Pengendalian dan Evaluasi Anggaran Pemerintah Daerah	Persentase Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Anggaran Pemerintah Daerah (%)		100%	4.647.560.500,00		
1	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang APBD	Jumlah Perda APBD sesuai kriteria dan tepat waktu (Dokumen)	Kantor BKAD	390 Dokumen	755.061.500,00	PAD	

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
2	Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran APBD	Jumlah Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran APBD (Dokumen)	Kabupaten Malang	410 Dokumen	704.242.500,00	PAD	
3	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan APBD	Jumlah Perda Perubahan APBD sesuai kriteria (Dokumen)	Kabupaten Malang	260 Dokumen	753.163.000,00	PAD	
4	Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Perbub Penjabaran Perubahan APBD sesuai kriteria dan tepat waktu (Dokumen)	Kabupaten Malang	560 Dokumen	652.565.500,00	PAD	
5	Peningkatan Pengelolaan Anggaran Daerah	Jumlah Peserta sosialisasi peraturan perundang-undangan tentang pengelolaan keuangan daerah (Orang)	Kabupaten Malang	164 Orang	941.602.500,00	PAD	

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
6	Peningkatan Pengelolaan Belanja Hibah dan Bantuan Sosial dari APBD	Jumlah Lampiran Perbub Tentang Penjabaran APBD yang memuat daftar nama dan alamat calon penerima hibah dan bantuan sosial (Dokumen)	Kabupaten Malang	500 Dokumen	404.080.500,00	PAD	
7	Evaluasi dan Asistensi Penyusunan Rencana Kerja Anggaran PD dan Perubahannya	Jumlah PD yang dievaluasi dan dilakukan pendampingan dalam pembuatan RKA (PD) dan perubahannya	Kantor BKAD	82 PD	436.845.000,00	PAD	
X	Program Peningkatan Pelaporan dan Akuntansi Pemerintah Daerah	Persentase peningkatan pelaporan dan akuntansi pemerintah daerah		100%	4.043.756.800,00		
1	Monitoring dan Evaluasi Penatausahaan Keuangan Daerah	Jumlah PD yang dievaluasi dalam penatausahaan keuangan sesuai kriteria	Kabupaten Malang	82 PD	768.392.400,00	PAD	

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
2	Penyusunan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah	Jumlah Buku Pedoman Kebijakan akuntansi yang disusun	Kabupaten Malang	200 Buku	94.583.400,00	PAD	
3	Penyusunan Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah	Jumlah buku sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah yang disusun	Kabupaten Malang	450 Buku	2.938.500,00	PAD	
4	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah Perda Pertanggungjawaban APBD yang disusun (dokumen)	Kabupaten Malang	450 Dokumen	920.683.000,00	PAD	
5	Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah Perbub Penjabaran Pertanggungjawaban APBD yang disusun (Dokumen)	Kabupaten Malang	550 Dokumen	872.468.000,00	PAD	
6	Penyusunan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah	Jumlah aplikasi sistem informasi pengelolaan keuangan daerah (aplikasi)	Kabupaten Malang	2 Aplikasi	728.080.000,00	PAD	

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
7	Bimbingan Teknis Implementasi Paket Regulasi tentang Pengelolaan Keuangan Daerah	Jumlah peserta bimtek pengelolaan keuangan daerah (orang)	Kabupaten Malang	164 Orang	656.611.500,00	PAD	
	JUMLAH TOTAL				88.958.728.205,00		

BAB V
PENUTUP

Dengan adanya Rencana Kerja ini, diharapkan prioritas Pelayanan Administrasi Keuangan dalam rangka Pembangunan Daerah dapat berjalan dengan baik sebagaimana Visi dan Misi Badan Keuangan dan Aset Daerah, serta mendukung Visi dan Misi Kepala Daerah agar dapat lebih terkoordinasi, terintegrasi dan sinergis dalam pencapaian sasaran yang telah ditetapkan. Selanjutnya Badan Keuangan dan Aset Daerah akan melaksanakan program pelayanan sesuai dengan program pembangunan dan kegiatan yang tertuang dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2019 serta mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2019, diharapkan dapat terealisasi secara optimal dan mencapai sasaran.

Rencana Kerja Badan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2019 ini digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan program/kegiatan selama satu tahun, dan sebagai penjabaran dari Rencana Strategis Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Malang.

Demikian untuk dilaksanakan.

WAKIL BUPATI MALANG,

ttd.

SANUSI